

**PENGARUH PM YINGLUCK SHINAWATRA DALAM MERUBAH
KEBIJAKAN LUAR NEGERI THAILAND TERHADAP UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN THAILAND-KAMBOJA**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Oleh:

AFRINALDI

0810852043



**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2014

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

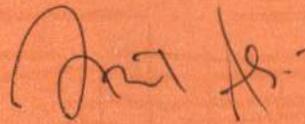
Nama : Afrinaldi
BP : 0810852043
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional (S1)
Judul Skripsi : Pengaruh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Dalam Merubahah Kebijakan Luar Negeri Thailand Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja

Pembimbing I



Delfiyanti, SH, M.H
NIP. 197502162001112201

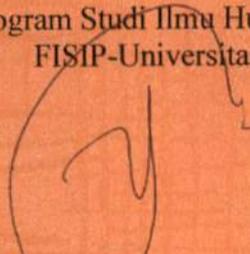
Pembimbing II



Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si
NIP. 198204132008122002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
FISIP-Universitas Andalas



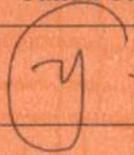
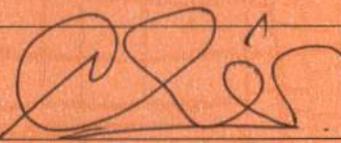
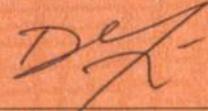
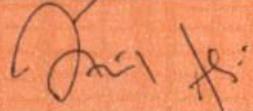
Yopi Petrian, S.IP, M.Si, M.PP
NIP. 197302192000031001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

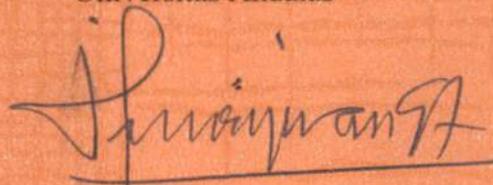
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan tim penguji serta diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 18 Desember 2013
Jam : 10.00 - selesai
Tempat : Ruang Sidang Jurusan, Gedung Jurusan Lantai 2
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas

Tim Penguji:

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|--|------------|--|
| 1 | Yopi Fetrian S.IP, M.Si, M.PP NIP. 197302192000031001 | Ketua |  |
| 2 | Apriwan, S.Sos, M.A NIP. 198104202005011009 | Sekretaris | |
| 3 | Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si NIP.198005202008011008 | Anggota |  |
| 4 | Delfiyanti, SH, M.H NIP.197502162001112201 | Anggota |  |
| 5 | Anita Afriani S, S.IP, M.Si NIP. 198204132008122002 | Anggota |  |

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Andalas



Prof.Dr. rer.soz Nursyirwan Effendi
NIP. 196406241990011002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul “Pengaruh Perdana Menteri Yingluck Shínawatra Dalam Merubah Kebijakan Luar Negeri Thailand Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja“ adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya ini murni gagasan, penilaian dan perumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai bahan acuan dalam skripsi saya dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Padang, 18 Januari 2014

Yang menyatakan

Afrinaldi

0810852043

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur terutama sekali penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya serta petunjuk dan kemudahannya, penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan sebuah karya tulis, yang berjudul “Pengaruh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Dalam Merubah Kebijakan Luar Negeri Thailand Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja”.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Andalas Padang. Dalam penyusunan skripsi ini berbagai pihak telah membantu, memberikan dorongan dan bantuan serta masukan yang berarti demi terselesaikannya skripsi ini. Sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Ibuk Delfiyanti, SH, M.H selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan yang sangat berarti serta memberikan pengarahan dan pencerahan sehingga penulis sangat terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan ilmunya, pengarahan, bimbingan dan nasihat sehingga penulis mempunyai semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Yopi Fetrian, S.IP, M.Si, M.PP selaku ketua jurusan sekaligus ketua penguji, serta Mas Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si dan Bang Apriwan,

S.Sos, MA juga selaku tim penguji yang telah memberikan banyak dukungan dan segala kemudahannya demi kelancaran skripsi ini.

4. Civitas akademika jurusan Ilmu Hubungan Internasional Unand Padang, Ibuk Dra.Ranny Emilia, M.Phil, Bang Poppy Irawan, S.IP, MA.IR, Haiyu Darman Moenir S.IP, M.Si, Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc, Muhammad Yusra, S.IP, MA, yang sudah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan, Ade Sapitra teruskan perjuanganmu, tetap Semangat,,, semoga cepat selesai, dan tercapai cita-citanya, Amin...Lifdawati, Thaks u so much atas bantuanya,, semoga cepat wisuda yachh.. Herlina, goodluck semoga sukses, Rahmat semangat yah,, Vicky Praga, Nina Hasanah Nasution dan Ima lanjutkan perjuanganmu...Water, Haris, Fajri, Cio,Sil, dan Diah kalian bisa...Doni Permana tetap semangat.... Pak Hen Thak u so much dan kawan-kawan angkatan HI 08 semoga sukses.
6. Para Alumni Hubungan Internasional Unand, Agung Setiadi Marza S.IP, Randi Famel S.IP, Siti Oktovani S.IP, Febi Febrino Ibnu, S.IP, dan rekan alumni yang lain, semoga sukses.
7. Brodon, Broris, Pak Ari, Febi Aromal, David Mai Hendri, Aulia, Ane, Rudi, Rahmat, Bang Abdul, Mydunsanak Fadli n Darmes, Fauzan, Zeno, Hendra Yuneldi, Hendra Kurniawan dan rekan-rekan let. Kemenkumham 2012 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu,,,JAGA INTEGRITAS..!!!

8. Pak Jon, Pak Jas, Bang Bayu, Buk Ida, Pak Nefo, Pak Kanit, Surya Nanda, Bang Wahyu, Buk Rini, Ni Adik, Buk Des, serta seluruh rekan yang tidak bisa penulis paparkan satu persatu.
9. Buat Anak-anak LP3I, Muhadist Bashir, Septiani Lova, Vivi, Wedo Kristi, Riko Aryadi, Sherly, dan Hendra.
10. Buat anak-anak KKN Sungai Tunu Utara, Fahrul Iryad, Alvin Cidaha, Irvan Rozi, Rifan, Santi, Monic, dan Rere.

Special Thanks buat orang tua tercinta, Mama tersayang, Dahniar Muchtar, Yang saya sayangi dan cintai. Yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus, yang telah merawat dan membesarkan kami, dan yang telah bekerja siang dan malam. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mama, terima kasih telah mendoakan kami.

Akhirnya dengan penuh kesadaran sebagai manusia, penulis menyadari bahwa apa yang telah dituangkan dalam skripsi ini jauh dari idealitas dan kesempurnaan, namun dengan lapang dada dan semangat memperbaiki, penulis menerima segala kritikan dan masukan yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Dan semoga apa yang telah penulis tuangkan, menjadi bagian dari kemanfaatan yang penulis harapkan khususnya dalam ranah studi Ilmu Hubungan Internasional.

Padang, 18 Januari 2014

Penulis

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan mengenai Pengaruh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam merubah kebijakan luar negeri Thailand terhadap upaya penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja. Sengketa Perbatasan sudah menjadi masalah laten bagi hubungan bilateral Thailand-Kamboja. Konflik ini terus berlangsung dan menjadi tradisi oleh kepala pemerintahan Thailand. Beberapa faktor menjadi latar belakang munculnya konflik ini, perbedaan peta yang dimiliki kedua negara, faktor sejarah, serta konflik ekonomi ikut mempengaruhi ketegangan. Pada masa pemerintahan Abhisit Vejjajiva konflik perbatasan kuil Preah Vihear semakin meluas ditandai dengan perang di perbatasan. Semenjak UNESCO secara resmi menetapkan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia pada tanggal 7 Juli 2008, sengketa kembali mengemuka. konflik ini dijadikan satu tujuan politik oleh Abhisit Vejjajiva untuk meredam gejolak politik yang terjadi didalam negeri Thailand pasca dikudetanya Thaksin Shinawatra. Pergantian Perdana Menteri oleh Yingluck Shinawatra menjadi babak baru hubungan Thailand-Kamboja. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dapat menyelesaikan konflik ini melalui kebijakan dengan mengedepankan diplomasi. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra secara terbuka bersedia melibatkan ASEAN dalam penyelesaian sengketa kawasan kuil Preah Vihear. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam merubah kebijakan luar negeri Thailand

Keyword; Pengaruh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, Kebijakan Luar Negeri, Konflik Perbatasan, Penyelesaian Sengketa

Abstract

This Research explains about influences Prime Minister Yingluck Shinawatra in changing Thailand foreign policy to resolve border dispute. Border dispute is a latent problem for Thailand-Cambodia bilateral relations. This conflict continues to progress and becomes a tradition by Thailand government leader. Some factors into the background of this conflict, such as a difference map between those countries, historical factors, as well as the influence of economic conflict tension. During the Abhisit Vejjajiva government, border dispute was characterized by increasingly widespread in the border war. Since UNESCO officially set the Preah Vihear temple as a world heritage on July 7, 2008 disputed re-started. This conflict made a set of political goals by Abhisit Vejjajiva to dampen the political turmoil of post Thaksin Shinawatra. Substitution by Prime Minister Yingluck Shinawatra to be a new round of Thai-Cambodian relations. Yingluck Shinawatra can resolve this conflict by diplomasi policy. Prime Minister Yingluck Shinawatra willing to involve ASEAN in resolving disputed Preah Vihear temple area. Prime Minister Yingluck Shinawatra has a very strong influence in changing the foreign policy of Thailand.

Keyword; Influence of Prime Minister Yingluck Shinawatra, Foreign Policy, Border Dispute, Dispute Resolution

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | 2 |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... | 3 |
| SURAT PERNYATAAN..... | 4 |
| KATA PENGANTAR..... | 5 |
| Abstrak..... | 8 |
| Abstract..... | 9 |
| Daftar Singkatan..... | 12 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. latar belakang..... | 13 |
| 1.2. Rumusan masalah..... | 19 |
| 1.3. Pertanyaan Penelitian..... | 20 |
| 1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 20 |
| 1.5. Studi Pustaka..... | 21 |
| 1.6. Kerangka Pemikiran..... | 29 |
| 1.6.1. Perubahan Kebijakan Luar Negeri..... | 29 |
| 1.6.2. Idiocyncratic..... | 33 |
| 1.6.3. Psycological Image..... | 34 |
| 1.7. Pembatasan Masalah..... | 37 |
| 1.8. Metodologi..... | 38 |
| 1.8.1. Metode dan Tipe Penelitian..... | 38 |
| 1.8.2. Unit Analisis..... | 38 |
| 1.8.3. Metode Pengumpulan Data..... | 39 |
| 1.8.4. Metode Analisis Data..... | 39 |
| 1.9. Sistematika Penulisan..... | 41 |
| BAB II. PEMBAHASAN | |
| 2.1 Sejarah dan Arti Penting Kuil Preah Vihear..... | 42 |

| | |
|--|------------|
| 2.2 Kronologi Sengketa Kawasan Kuil Preah Vihear..... | 49 |
| 2.3 Dinamika Hubungan Pemerintahan Thailand-Kamboja..... | 51 |
| 2.3.1. Masa Pemerintahan Thaksin Shinawatra..... | 51 |
| 2.3.2. Masa Pemerintahan Samak Sundarajev..... | 53 |
| 2.3.3. Masa Pemerintahan Abhisit Vejjajiva..... | 56 |
| BAB III. Perubahan Kebijakan luar Legeri Thailand Dalam Penyelesaian Pengketa Perbatasan Thailand-Kamboja..... | 69 |
| 3.1. Penyelesaian Sengketa Perbatasan Dilakukan Dengan Keterlibatan ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik..... | 69 |
| 3.2. Pemerintah Thailand-Kamboja Sepakat Membentuk Regional Border Committee dan General Border Committee..... | 72 |
| 3.3. Pemerintah Thailand- Kamboja Tarik Pasukan Militer Dari Perbatasan | 75 |
| 3.4. Thailand Izinkan Tim Pemantau (<i>Observer</i>) ASEAN..... | 80 |
| 3.5. Pemerintah Thailand-Kamboja Perkuat Kerja sama Ekonomi..... | 81 |
| BAB IV. Pengaruh PM Yingluck Shinawatra Dalam Merubah Kebijakan Luar Negeri Thailand Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja | |
| 4.1. Faktor Psikologis Yingluck Shinawatra..... | 89 |
| PM Yingluck Shinawatra Seorang Pemimpin Politik yang Demokrasi (Memajukan HAM, Peningkatan ekonomi dan Kesejahteraan, Serta Perjuangan dalam Menentang Rezim Militer..... | 91 |
| 4.2. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Mampu Mengontrol Kekuatan militer..... | 97 |
| 4.3. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Membentuk Kabinet..... | 107 |
| BAB. V PENUTUP | |
| 5.1. Kesimpulan..... | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 115 |

Daftar Singkatan

| | |
|---------------|--|
| <i>AFC</i> | <i>Agence France Presse</i> |
| <i>ASEAN</i> | <i>Association of Southeast Asian Nations</i> |
| <i>BA</i> | <i>Business Administration</i> |
| <i>GBC</i> | <i>General Border Committee</i> |
| <i>ICJ</i> | <i>International Court of Justice</i> |
| <i>IOT</i> | <i>Indonesia Observer Team</i> |
| <i>JBC</i> | <i>Joint Border Committee</i> |
| <i>KTT</i> | <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i> |
| <i>MOU</i> | <i>Memorandum Of Understanding</i> |
| <i>PBB</i> | <i>Perserikatan Bangsa Bangsa</i> |
| <i>PDZ</i> | <i>Provisional Demilitarized Zone</i> |
| <i>RBC</i> | <i>Regional Border Committee</i> |
| <i>TAC</i> | <i>Treaty of Amity and Cooperation</i> |
| <i>UNESCO</i> | <i>United Nations Education Scientific and Cultural Organization</i> |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Skripsi ini secara umum membahas mengenai kebijakan luar negeri Thailand dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja tepatnya didaerah sekitar kawasan kuil Preah Vihear. Studi ini dipusatkan pada pengaruh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam merubah kebijakan luar negeri Thailand terhadap penyelesaian sengketa perbatasan. Menarik bagi penulis untuk meneliti kajian ini karena telah terjadi perubahan kebijakan luar negeri Thailand seiring dengan pergantian Perdana Menteri Thailand. Pada masa pemerintahan Abhisit Vejjajiva, kebijakan luar negeri Thailand dalam penyelesaian sengketa perbatasan cenderung agresif. Abhisit menggunakan cara-cara militer dalam penyelesaian konflik. Namun, seiring pergantian Perdana Menteri, kebijakan luar negeri Thailand kemudian berubah, dimana proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai dengan mengedepankan diplomasi.

Secara geografis kawasan kuil Preah Vihear terletak di perbatasan wilayah Thailand dan Kamboja. Kawasan ini terletak tepatnya di antara distrik Choam Khsant di Provinsi Preah Vihear (Kamboja) dan distrik Kantharak di Provinsi Sisaket (Thailand).¹ Kawasan kuil ini telah lama menjadi sumber ketegangan hubungan antara Thailand dan Kamboja. Sengketa kawasan ini dilatarbelakangi karena perbedaan peta yang dimiliki oleh kedua negara. Thailand memiliki peta hasil dari

¹ Antara news. *Konflik Thailand Kamboja Dapat Diselesaikan Dengan Baik*. 12 September 0112011 <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/12/lree4e-indonesia-optimis-konflik-thailandkamboja-bisa-diselesaikan-dengan-baik> diakses 5 April 2012

pemetaan ahli Amerika yang menggambarkan kuil Preah Vihear berada di wilayah Thailand, sedangkan peta yang dimiliki Kamboja didasarkan kepada Hasil survei Perancis di dalam *Mixed Commission*² yang menggambarkan kuil Preah Vihear sebagai bagian dari Kamboja.³

Pada awalnya sengketa kawasan kuil Preah Vihear bermula pada persoalan batas wilayah dimana kedua negara mengklaim kepemilikan kuil Preah Vihear, namun setelah itu sengketa kawasan ini berkembang menjadi isu ekonomi. Kawasan kuil Preah Vihear ternyata kaya akan sumber daya alam. Diperkirakan kawasan ini mengandung hingga 11 triliun kubik gas alam, mineral dan minyak bumi⁴ sehingga sengketa tidak lagi terletak pada kuil Preah Vihear namun terletak pada kawasan disekitar kuil ini.

Sebenarnya pada tahun 1962 Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa kuil Preah Vihear berada di wilayah kedaulatan Kamboja. Keputusan Mahkamah Internasional tersebut didasarkan pada peta yang dibuat oleh pejabat Perancis pada tahun 1907 yang beberapa diantaranya adalah anggota *Mixed Commission* yang dibentuk berdasarkan *Boundary Treaty*⁵ antara Prancis dan Siam (sekarang bernama Thailand). Sembilan dari dua belas hakim Mahkamah

² *Mixed commission* muncul ketika dibentuknya perjanjian Franco-Siam yaitu perjanjian antara Siam (Thailand) dengan Prancis dimana dengan perjanjian tersebut disepakati bagaimana penyelesaian sengketa territorial. Sehubungan dengan perjanjian itu, maka dibentuklah lembaga yang dinamakan (**MIXED COMMISSION**) yang berfungsi menyelesaikan sengketa kawasan territorial

³ Haris Havas Oengroseno. *Sengketa Perbatasan Antar ASEAN*. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Kementerian Republik Indonesia. Jakarta. 2009, Hal 9

⁴ Rakyat Merdeka. *Rakyat Thailand Kamboja Rebutan Minyak Toh*. 13 Februari 2011 http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita_kemigasandan/detil/256399/sstt.Thailand_kamboja_rebutan_minyak_toh. Pada 29 april 2012 pukul 10.12

⁵ *Boundary Treaty* sehubungan dengan kesepakatan dalam perjanjian Franco-Siam oleh pemerintahan Prancis dan Siam dimana berdasarkan pada kesepakatan itu menyatakan bahwa kuil Preah Vihear berada pada wilayah kedaulatan Kamboja

Internasional menyatakan bahwa Kuil Preah Vihear berada dalam wilayah kedaulatan Kamboja. Interpretasi Makamah Internasional pada tahun 1959 menetapkan bahwa pihak *Siam* (Thailand) telah memberikan persetujuannya secara diam-diam (*aquiescence*) terhadap peta hasil survei pejabat Prancis karena tidak pernah mengajukan protes.⁶

Pemerintah Thailand pada awalnya menerima keputusan ini. Namun perselisihan kembali mengemuka ketika kuil Preah Vihear dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pemberian status ini dipicu ketika pemerintah Kamboja mengajukan proposal kepada UNESCO agar kuil Preah Vihear masuk kedalam situs warisan dunia. Usulan Kamboja tersebut kemudian diterima UNESCO. Pada tanggal 7 juli 2008 Kuil Preah Vihear secara resmi masuk kedalam situs warisan dunia *world heritage list* oleh UNESCO. Namun langkah ini nampaknya tidak dapat diterima oleh pemerintahan Thailand karena Thailand menganggap bahwa UNESCO mengajukan draf resolusi dan meminta anggota komisi untuk menyetujuinya tanpa membuka debat dengan Thailand.⁷

Atas peristiwa tersebut, disinilah berawal muncul ketegangan antara pemerintah Thailand dan Kamboja. Kedua negara mengerahkan hingga 1.000 tentara ke kawasan disekitar kuil. Pada pertengahan Agustus 2008, sebagian besar tentara ditarik dari perbatasan. Namun Puncak ketegangan kembali terjadi ketika delapan

⁶ Haris Havas Oengroseno. *Sengketa Perbatasan Antar ASEAN*. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Kementrian Republik Indonesia. Jakarta. 2009, Hal 10

⁷ Oke Zone. Preah Vihear Kekecewaan Thailand. 20 juli 2008
<http://okezone.com/read/2008/07/20/18/129236/preah-vihear-kekecewaan-thailand> Preah Vihear, Kekecewaan Thailand diakses 3 April 2011 pukul 12.13

puluh militer Thailand menyusup masuk ke wilayah Kamboja tepatnya di daerah sekitar kuil Preah Vihear.⁸ Kontak senjata pun terjadi sehari setelah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen meminta agar delapan puluh tentara Thailand keluar dari wilayah Kamboja akan tetapi permintaan PM Hun Sen tersebut tidak dipatuhi militer Thailand. Hingga Pada tanggal 15 Oktober 2008 militer Thailand dan Kamboja terus melakukan serangan satu sama lainnya. Dalam kejadian ini dilaporkan dua tentara Kamboja tewas dan lima orang tentara Thailand terluka.⁹

Kedua kepala pemerintahan Thailand dan Kamboja sebenarnya telah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Pada mulanya Pemerintah Thailand dan Kamboja sepakat untuk tidak melibatkan pihak luar dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan tersebut. Perdana Menteri Thailand Shom Chai Wongsawat mengatakan keterlibatan pihak luar dalam menyelesaikan konflik tidak diperlukan. Hal senada juga diungkapkan oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bahwa Kamboja tidak membutuhkan pihak penengah karena Thailand sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara bilateral sesuai dengan mekanisme yang ada.¹⁰ Namun pertemuan kedua kepala pemerintahan tidak mencapai kesepakatan bahkan keadaan semakin memanas karena kedua kepala pemerintah saling menuding satu sama lain.

⁸ Kompas. *Baku Tembak Pecah Diperbatasan*. 16 oktober 2008
http://www1.kompas.com/lipsus052009herculesread/2008/10/16/0759389/tentara_kamboja_vs_Thailand.dua_tewas diakses 25 April 2012

⁹ *ibid*

¹⁰ Media Indonesia. *Keterlibatan Pihak Luar Dalam Menyelesaikan Sengketa Ditolak*. Senin 20 oktober 2008

Belum tercapainya kesepakatan antara kedua negara dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, maka Pemerintah Indonesia sebagai ketua ASEAN menawarkan untuk membantu menyelesaikan ketegangan. Namun muncul persoalan ketika Pemerintah Thailand tidak menginginkan adanya campur tangan pihak luar. Pemerintah Thailand secara tegas mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menginginkan mediator dari ASEAN. Dalam KTT ASEAN ke-18 di Jakarta, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva menyatakan menolak keterlibatan mediator dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Kamboja. Seperti dikutip dari *The Nation*, Abhisit memilih untuk melakukan pembicaraan bilateral dibandingkan dengan keterlibatan mediator yang secara tradisi dilakukan oleh Ketua ASEAN yang saat itu dijabat oleh Indonesia.¹¹

Akan tetapi seiring dengan pergantian Perdana Menteri Thailand oleh PM Yingluck Shinawatra¹² kebijakan luar negeri Thailand dalam menyelesaikan sengketa kawasan kuilpun berubah. Pada pertemuan PM Yingluck dengan Presiden SBY di Jakarta mengungkapkan bahwa Pemerintah Thailand sangat menghormati upaya Indonesia dalam menyelesaikan ketegangan dengan Kamboja sehubungan dengan sengketa kawasan kuil Preah Vihear. Menurut PM Yingluck, Presiden Yudhoyono telah memberikan perhatian yang besar terhadap konflik perbatasan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja dan yakin bahwa konflik akan segera diselesaikan secara damai.

¹¹ Algooth Putranto. *RI Ditendang Dari Kamboja*, 14 Februari 2011. http://en.bisnis.com/article/ri_ditendang_dari_kamboja. diakses 10 maret 2012 pukul 13.20

¹² Yingluck merupakan adik kandung Thaksin, yang terguling dari kekuasaan setelah dikudeta oleh militer Thailand pada 2006. Thaksin sejak 2008 menjadi buronan aparat hukum Thailand setelah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi.

Lebih lanjut PM Yingluck Shinawatra dalam keterangan persnya mengatakan bahwa Thailand menyambut baik kepemimpinan ASEAN tahun ini yang diketuai Indonesia. Yingluck juga mengatakan, pihaknya mengapresiasi Presiden SBY yang dinilai memahami kebijakan yang diambil pemerintah Thailand sehubungan dengan penyelesaian sengketa kawasan kuil. Sedangkan pada kunjungan Yingluck ke Kamboja 15 September 2011, Yingluck mengatakan kepada Perdana menteri Kamboja, Hun Sen bahwa kerjasama antara Thailand dan Kamboja akan tetap dilakukan walaupun berberapa waktu lalu hubungan Thailand dan Kamboja memburuk. Bahkan kerjasama dengan Kamboja terus diperluas khususnya pada bidang perdagangan dan investasi, pembukaan pos permanen pemeriksaan perbatasan, promosi pariwisata, bantuan teknis dan beasiswa untuk mahasiswa Kamboja.

Pada pertemuan tersebut, Yingluck dan PM Hun Sen sepakat menyelesaikan sengketa secara damai. Kesepakatan ini ditunjukkan dengan diizinkan tim peninjau dari ASEAN yang diwakili oleh Indonesia untuk mengawasi wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja didaerah sekitar kuil Preah Vihear. Kemudian kedua negara sepakat membentuk zona bebas militer seluas 2,5 km untuk tujuan damai. Pada zona bebas militer tersebut pasukan Thailand dan Kamboja dilarang memasukinya kecuali pasukan Indonesia sebagai peninjau dari ASEAN. Dan perkembangan terakhir yaitu

Pemerintah Thailand telah menarik pasukan militernya dari wilayah kuil Preah Vihear.¹³

Dengan kepemimpinan PM Yingluck Shinawatra ini, maka upaya penyelesaian sengketa kawasan kuilpun dilakukan dengan cara-cara damai. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra memberikan pengaruh positif terhadap hubungan Thailand dan Kamboja dengan tidak lagi menekan isu kuil Preah Vihear. Penulis melihat bahwasanya PM Yingluck punya pengaruh yang cukup kuat terhadap perubahan pola-pola kebijakan luar negeri Thailand sebagai upaya penyelesaian sengketa perbatasan kuil Preah Vihear.

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang permasalahan didalam penelitian ini, terdapat perubahan kebijakan luar negeri Thailand dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja. Pada masa PM Abhisit Vejjajiva, penyelesaian sengketa perbatasan dilakukan dengan cara-cara militer hingga perang terus berlanjut, Namun seiring pergantian Perdana Menteri Thailand oleh Yingluck Shinawatra kebijakan luar negeri Thailand pun berubah yang pada akhirnya penyelesaian konflik perbatasan dilakukan dengan cara-cara kooperatif. Dalam hal ini PM Yingluck Shinawatra mempunyai pengaruh yang cukup kuat didalam merubah kebijakan luar negeri Thailand terhadap penyelesaian sengketa. Perubahan kebijakan yang dilakukan PM Yingluck Shinawatra tentunya menjadi indikasi bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu penulis menemukan rumusan masalahnya yaitu

¹³ Pelita online. Kamboja Tarik Tentara Ketujuh dari Perbatasan Thailand. http://www.pelitaonline.com/read_cetak/270/Kamboja_tarik_ketujuh_dari_perbatasan_Thailand diakses pada 23 April 2012

pengaruh PM Yingluck Shawartra terhadap perubahan kebijakan luar negeri Thailand dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja.

1.3 Pertanyaan penelitian

Pertanyaan utama didalam penelitian ini adalah **Bagaimanakah pengaruh PM Yingluck Shinawatra dalam merubah kebijakan luar negeri Thailand terhadap upaya penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja?**

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan adalah untuk mencari jawaban secara umum atas pertanyaan didalam rumusan masalah, Sedangkan secara khusus bertujuan untuk;

1. Mengidentifikasi perubahan kebijakan luar negeri Thailand oleh PM Yingluck Shinawatra
2. Menganalisis sejauh mana pengaruh individu sebagai pembuat kebijakan *decision maker* didalam proses keputusan kebijakan luar negeri suatu negara

Manfaat penelitian

1. Bagi penulis, Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pengaruh individu dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri serta memperkaya konsep dan teori ilmu hubungan internasional.

2. Memperluas pemahaman tentang kebijakan luar negeri Thailand pada masa Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

1.5 Studi Pustaka

Pada bagian ini, penulis menyuguhkan lima tulisan mengenai hal yang berhubungan dengan pengaruh individu didalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara. Studi pustaka ini digunakan sebagai bahan bandingan yang membedakan penelitian yang sedang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya. Untuk studi pustaka pertama dibuka dari jurnal yang ditulis oleh Pavin Chachavalponghun yaitu seorang akademisi dari Institute of Southeast Asian Studies (Singapura) dengan judul *The Dispute Thai Kambodia Border*.

Jurnal ini lebih cenderung melihat PM Abhisit Vejjajiva sebagai aktor utama munculnya konflik perbatasan Thailand-Kamboja. Kebijakan luar negeri Thailand dibawah pemerintahan PM Abhisit Vejjajiva dalam upaya penyelesaian sengketa cenderung dilakukan dengan cara-cara militer. Dalam keteranganya Abhisit menegaskan bahwa Thailand menolak mediator dari ASEAN dan menginginkan

penyelesaian melalui jalur bilateral dengan Kamboja.¹⁴ Di dalam jurnal ini juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa kawasan kuil Preah Vihear dengan menolak pihak luar sebetulnya adalah keputusan individual PM Abhisit didukung dengan pihak militer. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalan kekerasan bahkan perang. Hal ini menandakan bahwa Abhisit yang berlatar belakang militer sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Thailand. Kemudian dengan dukungan pihak militer, kedudukan Abhisit Vejjajiva semakin kuat sebagai kepala pemerintahan Thailand. Jurnal ini juga bisa menjadi rujukan untuk menambah referensi penelitian.

Studi pustaka kedua oleh Alexander Moens dan Inu Babeer dengan judul *The Foreign Policy of Barrack Obama Between Dreaming and Doing*. Didalam tulisannya disebutkan bahwa Barrack Obama adalah keturunan Afrika Amerika dan dibesarkan di Kansas (Amerika Serikat). Obama kuliah di University Of Hawaii dan sebagian besar waktunya di habiskan di Hawaii bersama nenek dan kakeknya. Obama tumbuh sebagai seorang yang mengenal budaya liberal. Akan tetapi Obama tidak sepenuhnya tumbuh dengan budaya liberal, sebab Obama juga berkebangsaan Afrika yang mengenal rasa seperti apa hidup di luar Amerika sehingga karakter kepribadian, nilai, dan moral sangat mempengaruhi pemikiran Obama.¹⁵

¹⁴ Pavin Chachapangvolphun. *The Dispute Thai Cambodia Border*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapura. 2006, 4

¹⁵ Alexander Moen and Inu Barbee. *The Foreign Policy Of Barrack Obama Dreaming And Doing*. Franses institute of Canada. 2010, 2

Ketika Obama menjadi Presiden AS, maka kebijakan luar negeri AS pun berubah. Perubahan kebijakan luar negeri AS ditunjukkan dalam upaya penarikan pasukan AS dari Afganistan dan Irak serta memilih berdialog dengan Iran dan Korea Utara walaupun kebijakan itu menuai kritik dari berbagai kalangan di AS. Didalam tulisan ini disebutkan sebenarnya karakter Presiden Barrack Obama dan gaya keputusannya dipengaruhi oleh tiga sifat. Pertama Obama adalah seorang intelektual yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta dapat merefleksikan filosofinya. Kedua, Presiden Obama adalah seorang yang berkeinginan untuk memahami perspektif orang lain. Ketiga Obama adalah seorang yang memiliki sisi pragmatis dan kompromi.

Dengan demikian tulisan ini menyimpulkan bahwa presiden Obama telah menggunakan kebijakan baru di era pemerintahannya. Obama yang pemikirannya sangat pragmatis dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri AS yang menjunjung tinggi nilai moral dan perdamaian. Sebagai seorang yang ingin memahami perspektif orang lain, Obama terus terus berusaha melakukan pendekatan dialog dengan negara yang selama ini menjadi musuh AS serta lebih memilih cara kompromi dalam penyelesaian masalah.

Selanjutnya Studi pustaka ketiga dari makalah Alresty Amalia Aldiny dengan judul Kebijakan nuklir Korea Utara pada masa Kim jong Un. Dalam tulisannya memaparkan bahwa pasca meninggalnya Kim Jong Il di penghujung tahun 2011 lalu, Korea Utara yang tertutup ini telah memilih anak terakhirnya untuk menjadi suksesor Korea Utara selanjutnya. Sebagaimana yang diberitakan oleh banyak media massa

internasional, bahwa sejak tahun 2010 Kim Jong Un yang sebelumnya disinyalir hampir tidak diketahui masa kecilnya, telah dipersiapkan oleh Kim Jong Il untuk mengambil alih dan memimpin militer Korea Utara.¹⁶

Kim Jong Un yang telah diberi pangkat Jenderal Bintang 4 dan Wakil Direktur Komisi Pusat Militer Korea Utara tersebut kini menjadi seorang sosok yang sedang dicari tahu oleh orang banyak, masyarakat internasional, terutama menyangkut bagaimana strateginya dalam memerintah Korea Utara di masa depan. Dengan menguasai militer, Kim Jong Un memastikan bahwa dirinya akan mewarisi alat kontrol terpenting yang dimiliki negara juga kebijakan "*military first*" Kim Jong Il.

Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara menyatakan tidak akan merubah arah kebijakan baik dalam maupun luar negerinya. Bahkan pada akhir tahun 2011 pemerintahan Korea Utara mengumumkan melalui stasiun televisi nasional mereka dengan tegas mengungkapkan bahwa Kim Jong Un akan tetap mewarisi ideologi Ayahnya yang komunis. Akan tetapi Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Akhir Februari 2012, Kim Jong Un mengambil langkah yang dapat dikatakan tidak agresif. Langkah tersebut adalah menyetujui untuk menanggihkan tes senjata nuklir dan program pengayaan uranium yang dimiliki Korea Utara, serta mengizinkan pemeriksa internasional untuk memeriksa bagian utama mesin nuklir mereka. Tidak hanya itu, Kim Jong Un juga menyetujui untuk melakukan moratorium terhadap uji

¹⁶ Alresty Amalia Aldiny. *Kebijakan Nuklir Korea Utara Pada Masa Kim Jong Un*. Universitas Gajah Mada. Jogyakarta. 2012, 3

coba misil jarak jauh Korea Utara. Sebagai konsesinya Kim Jong Un menuntut sekitar dua ratus ribu ton bantuan makanan dari Amerika Serikat untuk Korea Utara.

Adanya persetujuan ini sempat mengundang optimisme karena selama bertahun-tahun Korea Utara telah mengembangkan nuklirnya tanpa pengawasan. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa pemimpin baru Korea Utara setidaknya memiliki kemauan untuk mempertimbangkan negosiasi dan menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Namun tidak sampai sebulan persetujuan ini dicapai, Korea Utara kembali ke pola perilaku agresif yang dimilikinya dengan mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan satelit untuk mengorbit ke luar angkasa untuk memperingati 100 tahun Kim Il Sung.

Dalam kesimpulannya, paper ini menyatakan bahwa sebetulnya kebijakan luar negeri Korea Utara yang berada pada komando Kim jong Un didasarkan pada pilihan Kim Jong Un sebagai individu dalam proses pengambilan kebijakan. Berdasarkan kalkulasi untung-rugi dua alternatif yang dapat dianalisa, Kim Jong Un menjadi aktor yang rasional untuk tetap mempertahankan pengembangan nuklir Korea Utara karena masih ingin mempertahankan kemampuan militernya. Selanjutnya nukir digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik, mulai dari mempertahankan rezim berkuasa, meningkatkan *bargaining position*, serta digunakan sebagai alat diplomasi politik yang menguntungkan Korea Utara.

Sementara itu untuk Studi pustaka keempat dari skripsi yang ditulis oleh Aulia Nurul Heida Muhadjin dengan judul kebijakan luar negri Preseiden Hugo Chaves terhadap Amerika Serikat. Tulisan ini memaparkan bahwa kebijakan luar negeri presiden Hugo Chaves adalah Menasionalisasikan perusahaan minyak AS Di

Venezuela. Kebijakan ini berakar dari pandangan Hugo Chaves yang anti neokolonialis. Presiden Hugo Chaves dikenal dengan ideologinya yang demokrasi nasionalis yaitu sebuah paham yang mengedepankan kepentingan rakyat bawah. Kebijakan ini secara garis besar ditunjukkan untuk membantu sekaligus memperbaiki kehidupan rakyat miskin Venezuela.¹⁷

Presiden Hugo Chaves dianggap sebagai penerus perjuangan Amerika Latin yakni Simon Bolivar dan Simon Rodiquez. Ide-ide Simon Bolivar tertuang dalam Bolivarianisme kemudian diadopsi Hugo Chaves dalam program yang meliputi layanan gratis, subsidi pangan dan land reform, pendanaan untuk program itu didukung oleh pendapatan minyak Venezuela. Oleh karenanya kebijakan luar negeri Hugo Chaves menasionalisasikan perusahaan minyak Venezuela merupakan kebijakan yang tepat untuk mendukung ideologi sosialismenya.

Didalam skripsi ini menyebutkan bahwa paham Hugo Chaves tidak terlepas dari pengalaman masa lalunya. Chaves lahir pada 28 juli 1954 di Sabaneta. Ayah dan ibunya adalah guru militer di Venezuela. Selesai menjalani dinas militer, Chaves belajar ilmu politik di Universitas Simon Bolivar di Caracas. Pada pendidikan inilah Chaves dipengaruhi oleh ideologi sosialismenya. Chaves kemudian mengembangkan doktrin nasionalisme yang disebut bolivarianisme. Selepas kuliah Hugo Chaves menepati posisi penting hingga akhirnya melancarkan kudeta namun gagal.

Kudeta tersebut merupakan bentuk perlawanan kepada pemerintah yang menerapkan neoliberal yang anti Rakyat. Berawal dari itu, Chaves mengajar

¹⁷ Aulia Nurul Heida Muhadjin. *Kebijakan Luar Negri Hugo Chaves terhadap AS.*(Skrip; SIP, Universitas Muhamadyah Yogyakarta, 2008), hal 55-58

diakademi militer. Chaves menyaksikan betapa korupnya birokrasi serta tumpang tindihnya kesejahteraan antara kelas bawah dan elit pemerintahan. Chaves kemudian terinspirasi dari kemiskinan rakyat Venezuela yang diperkirakan mencapai 80%. Rakyat Venezuela hidup dengan kemiskinan yang justru terjadi ditengah kekayaan sumber daya minyak Venezuela.

Alasan inilah kemudian Chaves bermotivasi untuk menggulingkan pemerintahan yang korup. Melalui kudeta itu Chaves mendapatkan dukungan dari rakyat Venezuela. Hugo Chaves kemudian mendirikan partai *Monvimiento Quinta Republica* dan menempuh jalur politik hingga memenangkan pemilihan presiden Venezuela. Dengan terpilihnya Hugo Chaves menjadi presiden maka kebijakan luar negerinya untuk menasionalisasikan perusahaan minyak AS di Venezuela dapat direalisasikan. Maka dengan demikian kesimpulan dari skripsi ini bahwa kebijakan nasionalisasi perusahaan minyak Venezuela dipengaruhi oleh keputusan individu Chaves yang berakar pada ideologi sosialismenya.

Selanjutnya studi pustaka kelima datang dari jurnal yang ditulis oleh Amir M Haji Yousefi Phd dengan judul *Iran's Foreign Policy During Ahmadinejad from Confrontasi to Accomodation*. Tulisan ini memaparkan bahwa kebijakan luar negeri Iran pada masa Presiden Ahmadinejad adalah kebijakan membangun Program nuklir Iran, Kebijakan menentang hegemoni barat, serta berkerjasama dengan negara islam dan negara yang berseberangan dengan ideologi AS seperti Rusia, Korea Utara dan Venezuela. Tulisan ini menjelaskan bahwa kebijakan presiden Ahmadinejad

dipengaruhi oleh lima faktor, Salah satunya adalah faktor psikologi. Faktor psikologi Ahmadinejad terfokus pada kepribadian serta keyakinannya pada satu paham.¹⁸

Ahmadinejad adalah seorang yang sangat menganggumi Ayatullah Khomeini yaitu seorang revolusioner Iran yang menginginkan Iran menjadi negara yang mandiri tanpa bantuan dari Amerika. Khomeini juga merupakan salah satu orang diantara masyarakat Iran yang paling membenci Amerika. Karena bagi Khomeini Amerika merupakan negara yang suka menindas negara lain dan mencampuri urusan dalam negerinya. Sikap anti Amerika yang dikumandangkan oleh Khomeini, menjadi inspirasi bagi Ahmadinejad yang ikut berjuang melawan monarki Shah karena mereka menganggap Shah merupakan boneka Amerika untuk menguasai Iran.

Sikap seperti ini telah meningkatkan *selfconfidence* Ahmadinejad dalam kebijakan luar negerinya dan bergerak menjadi pemimpin yang tegas. Gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta manajemen informasi adalah varian lain pribadi yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Iran. Selain faktor psikologi, faktor sosial juga ikut mempengaruhi gaya keputusan Ahmadinejad. Berbeda dengan presiden sebelumnya Hashemi dan Khatami yang didukung oleh kelas menengah terutama oleh intelektual dan kelas pengusaha. Sedangkan Ahmadinejad didukung oleh kelas bawah.

Dalam propaganda pemilihannya, Ahmadinejad mengatakan bahwa komitmennya berkerja untuk rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyatnya sehingga dengan ini Ahmadnejad populer di kalangan bawah, agama dan revolusioner.

¹⁸ Amir M Haji Yousefi. *Iran's Foreign Policy During Ahmadinejad from Confrontasi to Accomodation. Sid Bahesthi Univeity, Tehran. Iran. 2010, 16*

Pada tahun 2005, Ahmadinejad berhasil memperoleh kemenangan dan menciptakan "Revolusi Islam ketiga" mengikuti kepemimpinan Ayatullah Khoehemi yang berjuang untuk rakyat dan negaranya dengan Independen bebas dari intervensi barat.

Dari lima studi pustaka diatas, penulis menyadari bahwa keputusan individu sangat berpengaruh terhadap keputusan luar negeri suatu negara. Pemimpin yang pada saat itu berkuasa didalam negaranya akan menentukan arah kebijakan luar negerinya sesuai dengan persepsi, pilihan dan kepempinannya. Maka dengan itu penulis memosisikan penelitian ini dengan fokus kepada karakter individu Yingluck terkait dengan pengaruh Yingluck Shinawatra terhadap kebijakan luar negeri Thailand sebagai upaya penyelesaian sengketa kawasan kuil Preah Vihear.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Untuk menjelaskan pola perubahan kebijakan luar negeri Thailand maka penulis akan mengidentifikasi fenomena ini melalui analisis perubahan kebijakan luar negeri. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui mengapa negara merubah kebijakan luar negeri sekaigus melihat faktor apa yang dapat menyebabkan negara merubah kebijakan luar negerinya sehingga dengan analisis ini diharapkan akan dapat menjawab pertanyaan penelitian diatas. Dalam tulisan Vinsensio Dugis dengan judul *Explaining Foreign policy Change* menyebutkan bahwa untuk menganalisis pola perubahan kebijakan luar negeri maka harus mengelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni;¹⁹

¹⁹ Vinsensio dugis. *Explaining Foreign Policy Change*. Hubungan Internasional FISIP Universitas Air langga. Surabaya. 2006,102

Pertama teori sistem, teori ini menjelaskan bahwa perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internasional. Dengan kata lain perubahan kebijakan luar negeri dipandang sebagai pola penyesuaian terhadap perubahan lingkungan eksternal. Kedua teori sosial, teori ini menjelaskan bahwa perubahan kebijakan luar negeri dipandang sebagai hasil dari politik domestik dan budaya suatu negara. Teori ini menekankan pentingnya politik domestik untuk menentukan arah kebijakan yang akan dibuat. Ketiga teori *state centric*, teori ini menjelaskan bahwa pola perubahan kebijakan luar negeri bersumber pada struktur pemerintah termasuk kepala negara. Kepala negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri serta dapat bertindak sebagai *decision maker* dengan memutuskan dan mengimplemetasikan kebijakan luar negerinya.²⁰

Secara umum pola perubahan kebijakan luar negeri disebabkan oleh dua faktor; pertama, perubahan kebijakan luar negeri oleh kepala negara yang berkuasa pada saat itu, namun memutuskan untuk merubah arah kebijakan luar negerinya. Dinamika ini terjadi ketika keyakinan dan sikap kepala negara secara drastis berubah. Kedua, perubahan kebijakan luar negeri yang disebabkan oleh pergantian kepala negara. Pola perubahan inilah yang dikembangkan oleh Kjell Goldmann dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Goldmann pergantian kepala negara dapat merubah kebijakan luar negerinya, kepala negara dengan ide-ide baru akan berusaha untuk merubah kebijakan luar negerinya. Dengan demikian perubahan kebijakan luar negeri pada dasarnya dirancang dan dirumuskan oleh kepala negara.

²⁰ *ibid*

Secara spesifik Goldmann memaparkan bahwa pergantian pemimpin cenderung akan merubah sistem politik domestik yang ada sedangkan politik domestik berhubungan erat dengan kebijakan luar negeri. Untuk menjelaskan hubungan politik domestik dengan kebijakan luar negeri, Goldmann menunjukkan ada tiga dimensi yang penting dalam hubungan antara politik domestik dan kebijakan luar negerinya²¹. Pertama terletak pada soal institusi negara yaitu sejauh mana pemerintah suatu negara menaruh perhatian terhadap masalah luar negeri dan berkomitmen untuk melaksanakan maupun mengubah kebijakan luar negerinya sesuai dengan tujuan negaranya. Kedua terletak pada soal tingkat dukungan, hal ini mengacu pada sejauh mana berbagai aktor dalam politik domestik mendukung atau menentang kebijakan luar negeri maupun merubah arah kebijakan luar negerinya. Ketiga terletak pada masalah politik domestik yang berujung pada pentingnya perubahan kebijakan luar negeri dalam perjuangan untuk pencapaian kekuasaan politik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Goldmann menunjukkan bahwa dinamika politik dalam negeri dapat mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat melalui perebutan kekuasaan politik dalam negeri dimana isu-isu kebijakan luar negeri menjadi pusat perhatian mereka. Pemimpin politik bersaing dengan menggunakan isu-isu kebijakan luar negeri sebagai sarana untuk membedakan diri dari para pemimpin atau kelompok lain. Isu menjadi bagian penting dalam pencapaian kekuasaan politik, Biasanya para petinggi politik yang bertarung memperebutkan kekuasaan mereka dengan menggunakan isu kebijakan

²¹ Goldmann, K. (1988) *Change and Stability in Foreign Policy: The Problems and Possibilities of Détente*. New York: Harvester Wheatsheaf.175-178

luar negeri dan jika mereka berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat maka pemimpin yang baru akan berkuasa dan kebijakan luar negeripun akan berubah. Dalam situasi ini, pemimpin baru dengan kelompok-kelompok pendukungnya dapat mengakibatkan perubahan kebijakan luar negeri.²²

Hal ini dapat digunakan sebagai sumber untuk penjelasan mengapa kebijakan luar negeri berubah. Maka dari itu Goldmann mengadopsi pemikiran ini dan memaparkan kebijakan luar negeri berubah seiring dengan pergantian pemimpin negara. Pemimpin baru tentunya akan berusaha mengubah haluan politik luar negerinya. Sedangkan Politik domestik dan kebijakan luar negeri saling memengaruhi satu sama lain. Asumsi dasar yang disimpulkan oleh Goldmann adalah pemimpin baru merubah kebijakannya melalui proses keputusan dan dukungan dari berbagai pihak.

Dari poin ini penulis menyadari berbagai tingkat perubahan yang perlu dijelaskan dan bahwa agen utama yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri adalah kepala pemerintahan suatu negara. Dengan kata lain, kepala pemerintah dapat bertindak dalam proses pengambilan keputusan luar negeri. Proses itu sendiri dapat menghalangi atau memudahkan perubahan kebijakan luar negeri. Bagi penulis pola perubahan kebijakan luar negeri yang dikembangkan oleh Goldmann cukup membantu dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Thailand. Perubahan kebijakan luar negeri Thailand terjadi seiring dengan pergantian perdana menteri Abhisit Vejjajiva oleh Yingluck Shinawatra.

²² *Ibid*

1.6.2. *Idiocyncratic*

Setelah melihat pola perubahan kebijakan luar negeri oleh Goldmann yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan luar negeri terjadi seiring dengan pergantian kepala negara maka hal ini dapat dikatakan bahwa kepala negara dianggap sebagai agen yang paling berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam studi ilmu hubungan internasional, individu memiliki pengaruh yang cukup signifikan mengingat bahwa individu sebagai salah satu bagian dari pembuat keputusan sekaligus dapat mempengaruhi hasil dari kebijakan luar negeri.

Akan tetapi pengaruh individu akan semakin terasa ketika individu tersebut mempunyai power serta kekuasaan yang dimilikinya. Aspek kekuasaan (*power*) pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai suatu pola perencanaan yang digunakan oleh para pembuat keputusan *decision maker* untuk mencapai tujuan nasional.²³ Maka faktor individu ini akan mempengaruhi setiap kegiatan kebijakan luar negeri suatu negara.

Kuatnya pengaruh individu dalam proses pengambilan keputusan pada akhirnya memunculkan istilah *idiosyncratic*. *Idiosyncratic* adalah suatu hal yang mempelajari tentang pengaruh individu dalam pembuatan kebijakan luar negeri.²⁴ *Idiosyncratic* merupakan istilah yang berasal dari kata *ideology* dan *syncratic*.

²³ Drs. Teuku May Rudi. SH, MH, MIR. *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung. 2002, 5

²⁴ Yayan M. Yani dan A.A. Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 49.

Ideologi merupakan paradigma analisis untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah. Dan istilah *syncratic* adalah gabungan semua yang baik dari semua yang ada. *Idiosyncratic* dapat digunakan sebagai analisa individu didalam politik luar negeri suatu negara.

Secara umum *idiosyncratic* merupakan segala aspek yang dimiliki oleh individu sebagai bagian dari pembuat keputusan, nilai, bakat, dan pengalaman yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku individu terhadap kebijakan luar negeri. lebih singkatnya, James Coulombis mendefinisikan faktor *idiosyncratic* sebagai salah satu variabel yang berkaitan dengan citra (*image*), karakteristik pribadi individu pembuat keputusan serta persepsi pembuat keputusan.²⁵

Dalam pengambilan keputusan luar negeri, individu sebagai *decision maker* cenderung bertindak berdasarkan pada persepsinya. Persepsi memainkan peran kunci dalam proses pengambilan kebijakan karena hal ini dapat membentuk realitas operasional.²⁶ Persepsi sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mendefinisikan suatu situasi tertentu. Sementara defenisi Persepsi diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu berdasarkan pada pengetahuan dan informasi serta pengalaman yang dimiliki seseorang. Persepsi merupakan bagian yang penting dalam proses pengambilan keputusan luar negeri.

1.6.3. Psychological Images

Penting ditelaah lebih lanjut mengenai pendekatan *psikological images* dari Perdana Menteri Yingluck Shinawatra karena PM Yingluck Shinawatra merupakan

²⁵ *ibid*

²⁶ William Shakespeare, *The Merry Wives of Windsor. Level Analisis and Foreign Policy. International Relations Articles In the New York times hapter 3. USA. 2009, 67*

seorang pemimpin yang bertindak sebagai *decision maker of foreign policy*. Maka berbicara mengenai individu dalam pengambilan kebijakan politik sebetulnya tidak terlepas dari faktor psikologisnya. Unsur psikologis tersebut dipengaruhi oleh kemampuan berpolitik, image, persepsi, dan karakteristik individu sebagai pembuat keputusan.²⁷ Sedangkan dalam unsur psikologis terdapat segala hal yang berkaitan dengan ideologi, kepercayaan, dan budaya yang dapat mempengaruhi psikologis para pengambil kebijakan.²⁸

Akan tetapi individu sebagai *decision maker* tentunya harus mempunyai pengaruh yang kuat. Semakin kuat posisinya maka akan semakin besar pengaruhnya didalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Janice Gross Stein mengungkapkan tentang pentingnya individu dalam proses pengambilan keputusan. Gross menyatakan bahwa posisi penting pengaruh dari seorang individu dalam kaitan pengambilan keputusan politik luar negeri adalah di saat individu tersebut adalah tokoh yang berotoritas dalam perpolitikan, misalnya presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan ataupun perdana menteri.²⁹

Faktor psikologis cenderung mempengaruhi cara pandang kepala negara dalam memutuskan kebijakan luar negeri negaranya. Pendekatan psikologis seorang kepala negara juga dapat dijadikan indikasi bagaimana sifat dan karakter kepemimpinannya. Pemimpin Otoriter misalnya, Pemimpin ini menganut paham

²⁷ Mark Webber and Michael Smith. *Foreign Policy In A Transformed World*. (United Kingdom: Prentice Hall, 2002),58.

²⁸ *Ibid*, 60

²⁹ Janice Gross Stein. *Foreign Policy Decisions Making: Rational, Psychological, and Neurological Model* dikutip dalam buku Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dumne. *Foreign Policy Theories: Actors & Cases* (Oxford: Oxford University Press, 2008),113.

bahwa dirinya adalah segalanya. Pemimpin yang membuat aturan dan orang-orang didalam organisasinya harus mematuhi apapun yang dikehendaki dan menjadi keputusannya. Pemimpin otoriter biasanya menggunakan kekuasaan dan wewenang formal di dunia militer dan berbasis pada kekuatan angkatan bersenjata yang dimiliki untuk mem-*back up* threathment dari luar. Kebijakan luar negerinya lebih memprioritaskan keamanan dan kedaulatan negaranya.

Berbeda dengan pemimpin yang demokrasi, kebijakan luar negeri negaranya lebih cenderung terbuka. Karakter dari pemimpin ini juga tidak menyukai kekerasan. Pemimpin dengan karakter demokrasi lebih memilih untuk melakukan pendekatan dialoq dalam penyelesaian suatu masalah. Pemimpin demokrasi telah memberikan kontribusi untuk mempromosikan hak asasi manusia, kebebasan, dan demokrasi di negara-negara berkembang. Gerakan demokrasi telah menyumbang kemajuan sejarah demokrasi. Di beberapa negara, pemimpin politik telah berjuang melawan kediktatoran, rezim militer, dan segregasi rasial. Pemimpin demokrasi digambarkan sebagai perjuangan untuk melawan rezim militer dan pemimpin yang diktator.³⁰

Dukungan rakyat juga menjadi salah satu faktor kunci dalam mempromosikan perubahan demokratis sosial dan sistem demokrasi (Fox & Brown, 2000; Wiseman, 1996). Pemimpin dalam gerakan demokrasi telah mengorganisir kekuatan rakyat dan telah berjuang untuk menciptakan demokrasi serta menentang rezim militer. Karakteristik yang paling umum dari kepemimpinan demokrasi adalah visi (Bass,

³⁰ Shanghan Choi. *Democratic Leadership: The Lessons of Exemplary Models for Democratic Governance*. International Journal of Leadership Studies. Florida Atlantic University. USA. 2007, 204-207

1990; Northhouse, 1997, Yukl, 2002). Dalam situasi ekonomi, kepemimpinan demokratis melibatkan visi untuk nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan.³¹ Kepemimpinan demokratis memainkan peran integral dalam mencapai demokrasi karena dikaitkan dengan nilai-nilai publik, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

Rezim militer dan pemimpin diktator cenderung menghambat sistem demokrasi. Di seluruh dunia, kita mengamati bahwa para pemimpin demokrasi telah berkorban dan berjuang melawan kediktatoran dan rezim militer. Menerapkan kerangka kerja untuk Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Yingluck Shinawatra sebagai model teladan dari kepemimpinan dalam gerakan demokrasi untuk mencapai pemerintahan yang demokrasi.

1.7 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka pada tahap ini penelitian ini terfokus pada pengaruh Yingluck Shinawatra terhadap perubahan kebijakan luar negeri Thailand dalam menyelesaikan sengketa perbatasan pada tahun 2011-2013. Namun tidak tertutup kemungkinan akan diambil data pada kepemimpinan PM Abhiet Vejjaiwa pada 2008-2011 agar terlihat jelas perubahan yang terjadi pada kebijakan luar negeri Thailand disamping itu penulis juga mengambil data dari rentang waktu lain mengingat konflik kuil Preah Vihear sudah muncul pada abad kesebelas masehi.

³¹ *ibid*

1.8 METODOLOGI

1.8.1. Metode dan Tipe Penelitian

Metodologi merupakan langkah-langkah yang diterapkan pada penelitian guna melakukan kajian terhadap suatu masalah atau fenomena dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau cara pemecahan masalah berdasarkan pada pengolahan data yang dihimpun.³² Metodologi juga dapat dikatakan sebagai suatu cara yang sistematis digunakan untuk menguji suatu teori.³³ Didalam penelitian ini, Penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitiannya adalah deskriptif-analitis. Tipe penelitian deskriptif analitis merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang telah maupun yang sedang terjadi dengan menggunakan data yang deskriptif berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel.³⁴ Data-data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif

1.8.2. Unit analisis

Fokus pemikiran dalam tulisan ini terdiri dari unit analisis dan level analisis. Unit analisis adalah unit yang perilakunya akan dijelaskan dalam penelitian. Dalam

³² Drs Teuku May Rudy. *Teori, Etika dan Kebijakan hubungan Internasional*. Bandung. 2002, 5

³³ Deltle F.S and Yael Wolinskyprinz Nahmias. *Introducion; Metodologi In International relation research*. (Departemen of Global Change and Social System of Postdam Institute; Jerman.) 2001, 4

³⁴ Dr. Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), 6

hal ini unit analisis yang penulis gunakan adalah individu. Biasanya individu sebagai unit analisis terpusat pada persepsi, pilihan dan tindakan individual.³⁵ Sedangkan Mochtar Mas'oeed menyebutkan bahwa level analisis diperlukan untuk memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan permasalahan yang dikemukakan.³⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan level analisis negara yaitu mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Thailand dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik secara khusus Psikologis pengambil keputusan luar negeri.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian keperustakaan (*library research*) sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan penelitian ini berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai pengaruh individu didalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, Buku-buku jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel yang berhubungan internasional antara Thailand dan Kamboja serta dari media elektronik yang memberikan informasi mengenai PM Yingluck Shinawarta. Mengingat keanekaragaman sumber informasi yang dapat diperoleh, maka dalam penulisan ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penulisan. Data-data akan diolah sehingga menghasilkan sejumlah informasi

³⁵ Joshua S Goldstein and John C Pavehouse. *International Realation eight Edition*. 2007. USA, 14

³⁶ Moechtar Mas'oeed. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metologi*. Jakarta: LP3ES. 1990, 39

tentang Pengaruh Yingluck dalam merubah kebijakan luar negeri Thailand sebagai upaya penyelesaian sengketa kawasan kuil Preah Vihear.

1.8.4. Metode analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan didalam suatu penelitian.³⁷ Dalam tahap ini penulis melakukan penganalisaan data dengan menginterpretasikan data-data dan serangkaian informasi yang diperoleh dari pengumpulan data. Interpretasi data merupakan suatu proses pemberian makna terhadap pola-pola yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Jadi data-data yang telah diinterpretasikan diharapkan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Hasil analisis ini akan memberikan suatu gambaran terhadap situasi dan fenomena sehingga dapat dipahami dan nantinya akan membentuk suatu pengetahuan yang teruji mengenai pengaruh Yingluck Shinawatra dalam merubah kebijakan luar negeri Thailand.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Karya , 1989), 112-113.

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I.** Sebagai Pendahuluan yang Memuat Mengenai Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Teori dan Konsep yang Akan Dipakai Dalam Penelitian, Metodologi Penelitian, Pembatasan Masalah dan Sistematika Penulisan. Menggambarkan Secara Keseluruhan Tentang Penelitian yang Akan Dilakukan
- BAB II.** Dinamika Konflik Kuil Preah Vihear Serta Dinamika Kebijakan Luar Negeri Thailand Terhadap Kamboja
- BAB III.** Menguraikan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Thailand Pada Masa Perdana Menteri Yingluck Shinawatra
- BAB IV.** Pengaruh PM Yingluck Shinawatra Dalam Merubah Kebijakan Luar Negeri Thailand Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa perbatasan Thailand-Kamboja.
- BAB V.** Menyuguhkan Hasil Terpenting Dari Penelitian, Kesimpulan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah dan Arti Penting Kuil Preah Vihear

Kuil Preah Vihear merupakan sebuah kuil hindu yang dibangun pada abad 9 Masehi oleh Raja Suryavarman I dan Raja Suryavarman II. Kuil ini dalam bahasa Khmer adalah Prasat Preah Vihear. Kuil Preah Vihear ini terletak di atas dataran setinggi 525 meter di Pegunungan Dangrek di wilayah Preah Vihear, (Kamboja) dan berbatasan dengan wilayah Sisaket di bagian timur laut Thailand. Kuil Preah Vihear memiliki lansekap yang paling mengagumkan di antara semua kuil yang dimiliki semasa Kekaisaran Khmer selama 600 tahun. Sebagai tempat terpenting bagi kerohanian kekaisaran di masa itu, kuil ini dibangun dan direnovasi atas perintah raja-raja yang silih berganti. Maka terdapat berbagai unsur gaya seni arsitektur pada berbagai ornamen kuil yang mirip candi kecil ini.³⁸

Kuil Preah Vihear berbeda dengan kuil-kuil Khmer lainnya karena kuil ini didirikan memanjang dari ujung utara hingga selatan. Padahal kuil-kuil lain biasanya berbentuk segi empat dan menghadap ke timur. Walaupun kuil ini hanya berupa puing-puing bangunan, akan tetapi kuil Preah Vihear ini masih mempunyai nilai arkeologis dan artistik yang sangat tinggi. Kuil ini adalah tempat suci bagi penduduk sekitar dan sering digunakan sebagai tempat ziarah. Nama kuil ini diambil dari nama wilayah Preah Vihear di Kamboja yang menjadi tempat berdirinya kuil ini dan juga

³⁸ Suara Karya. *Kuil Preah Vihear Sumber Sengketa Thailand Dan Kamboja*. diakses dari <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=211594> pada 29 september 2012 pukul 13:00 wib

Taman Khao Phra Wihan di wilayah Sisaket, Thailand di mana dari jalur inilah jalan yang paling mudah untuk memasuki kuil tersebut. Situs bersejarah ini berjarak 405 kilometer dari Phnom Penh dan memiliki tiga akses, yakni dari Thailand untuk para wisatawan internasional, dari Kamboja melalui jalan kuno via Svay Chrum, dan Road C1 yang dibangun Khmer Rouge.

Kuil Preah Vihear terdaftar oleh Thailand sebagai wilayah yang terletak di desa Bhumsrol, Bueng Malu sub-distrik, di Kantharalak distrik provinsi Srisaket di bagian timur Thailand. Sejarahwan Thailand, Charnvit Kasetsiri mengungkapkan bahwa Khmer merah sebenarnya juga merupakan bagian dari Thailand. Para pemimpin masa lalu Thailand memasukkan elemen-elemen dari warisan budaya Khmer kedalam sejarah Thailand.³⁹ Selama bertahun-tahun kewan kuil Preah Vihear menjadi sumber perselisihan Thailand-Kamboja.

Pada periode antara tahun 1904-1908 Pemerintah Perancis⁴⁰ dan Pemerintah Siam sepakat untuk menetapkan garis batas kedua negara yang dituangkan dalam Perjanjian Franco-Siamese tanggal 13 Februari 1904. Pada Pasal 1 Perjanjian Franco-Siamese tanggal 13 Februari 1904 ini menjelaskan secara umum mengenai perbatasan antara Kamboja dan Siam. Mengenai wilayah Dangrek di dalam Pasal 1 menetapkan wilayah tersebut sebagai daerah batas garis air (*watershed*). Suatu komisi gabungan (*Mixed Commition*) telah dibentuk dan mengadakan pertemuan pertamanya pada

³⁹ Charnvit Kasetsiri, "Thailand-Cambodia: A Love-Hate Relationship," *Kyoto Review of Southeast Asia* 3, 2003.

⁴⁰ Pemerintahan Perancis menduduki wilayah Kamboja hingga 1954, sementara kerajaan Siam sekarang bernama Thailand.

bulan Januari 1905. Akan tetapi komisi gabungan ini tidak membahas daerah timur dari wilayah pegunungan Dangrek hingga Desember 1906 (lokasi dimana Kuil Preah Vihear berada). Komisi pengawas gabungan menyelenggarakan pertemuan terakhirnya pada tanggal 19 Januari 1907. Pemerintah Perancis dan Pemerintah Siam kemudian mengadakan perjanjian lanjutan pada tanggal 23 Maret 1907 dimana mereka membuat komisi pengawas gabungan yang kedua dan mempunyai tugas untuk menentukan perbatasan di bagian lain dari wilayah Dangrek.⁴¹

Kegiatan yang selanjutnya dilaksanakan oleh komisi pengawas gabungan adalah persiapan untuk pembuatan peta. Pemerintah Siam meminta kepada Pemerintah Perancis untuk melakukan tugas tersebut karena tidak memiliki fasilitas teknis yang diperlukan untuk membuat peta tersebut. Dari empat orang petugas Pemerintah Perancis yang ditetapkan untuk mempersiapkan peta, tiga orang diantara anggotanya adalah merupakan anggota dari komisi pengawas gabungan yang pertama yang didirikan berdasarkan Perjanjian tahun 1904. Beberapa peta telah dibuat dan dikirimkan pada tanggal 20 Agustus 1908 oleh Menteri Pemerintah Siam yang berada di Paris kepada Pemerintah Siam yang berada di Thailand. Salah satu dari peta-peta tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Kuil Preah Vihear berada di dalam wilayah Kamboja dari garis batas antara Kamboja dan Thailand.⁴²

⁴¹ Monticha Packdeekong. *Who Owns The Preah Vihear Temple A Thai Position*. Jurnal of East Asia and international Law. 2009, 230

⁴² Bora Touch. *Vihear Temple of Cambodia position*. Jurnal of East Asia And International Law. Jiyun institution. Cambodia. 2007, 207

Pada tahun 1930, Pangeran Damrong yang merupakan mantan Menteri Dalam Negeri dari Pemerintahan Siam (pada saat itu menjabat sebagai *President Royal Institute*) mengadakan perjalanan arkeologis ke Kuil Preah Vihear. Dimana di dalam perjalanan yang dilakukan oleh Pangeran Damrong telah mengibarkan bendera Perancis di sekitar wilayah Kuil Preah Vihear dan tidak ada protes yang timbul dari Pemerintah Thailand mengenai hal tersebut.

Pada tahun 1934-1935, Pemerintah Thailand menyelenggarakan suatu survei atas wilayah Kuil Preah Vihear dan menyimpulkan bahwa ada divergensi atau perbedaan pendapat antara garis peta dan garis batas pada batas garis air di daerah Kuil Preah Vihear. Akan tetapi isu mengenai perbatasan tersebut tidak diangkat pada tahun 1937. Ketika Pemerintah Perancis dan Pemerintah Siam merundingkan kembali suatu Perjanjian Persahabatan, Perdagangan, dan Navigasi pada tahun 1925. Dan pada tahun 1937 Pemerintah Thailand membuat sebuah peta yang menunjukkan bahwa Kuil Preah Vihear terletak di wilayah Kamboja.

Pada tahun 1949, Pemerintah Perancis mengirimkan beberapa memorandum kepada Pemerintah Thailand untuk mempertanyakan keberadaan pasukannya yang berada di sekitar wilayah Kuil Preah Vihear. Sekaligus Pemerintah Perancis memberitahukan dan menjelaskan bahwa Kuil Preah Vihear terletak di wilayah Kamboja dan meminta informasi kepada Pemerintah Thailand atas kondisi disana. Akan tetapi memorandum yang dikeluarkan Pemerintah Perancis tersebut diabaikan oleh Pemerintah Thailand.

Pada tahun 1953 Kamboja memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan Perancis. Pemerintahan Kamboja memutuskan untuk mengirimkan tentaranya ke Kuil Preah Vihear guna berjaga-jaga disekitar wilayah kuil tersebut dan menyatakan bahwa Kuil Preah Vihear berada di wilayah Kamboja. Namun sebelumnya tentara Thailand telah berada di kawasan kuil Preah Vihear. Pemerintah Kamboja mengirimkan memorandum kepada Pemerintah Thailand yang isinya mempertanyakan tentang keberadaan tentara militernya di wilayah Kuil Preah Vihear. akan tetapi tidak ada respon dari pemerintahan Thailand atas memorandum yang dikirim oleh Pemerintah Kamboja itu .

Hingga pada Tahun 1959 Pemerintahan Kamboja mengajukan protes kepada Pengadilan Internasional (ICJ) mengenai keberadaan militer Thailand di wilayah Kuil Preah Vihear. Pengadilan Internasional mengambil keputusan pada tahun 1962 dan memberikan wilayah tersebut kepada Kamboja. Sembilan dari dua belas hakim internasional memutuskan bahwa kuil Vihear berada diwilayah kedaulatan Kamboja. ICJ juga memerintahkan Thailand menarik mundur pasukannya dari Candi Preah Vihear yang dinyatakan sebagai milik Kamboja.⁴³ Pendapat mayoritas hakim internasional ini berdasarkan perjanjian Franko-siam pada peta yang dibuat pemerintah kolonial Prancis tahun 1907dengan prinsip estoppel⁴⁴

⁴³ Monticha Packdeekong. *Who Owns The Preah Vihear Temple A Thai Position*. Jurnal of East Asia and international Law.2009, 232

⁴⁴ Prinsip estoppel merupakan suatu situasi atau keadaan dimana kegagalan pihak Thailand menyatakan keberatan terhadap peta yang dibuat oleh pejabat Prancis dalam perjanjian Franko-Siammis 1904

Pemerintah Thailand sempat mengajukan banding karena menganggap bahwa pihaknya tidak terikat pada isi perjanjian pada annex map 1 tersebut. Namun pada akhirnya pemerintahan Thailand menerima keputusan tersebut dan segera menarik pasukan militernya dari wilayah perbatasan. Hingga pada tahun 1970 terjadi pergantian pemerintah Kamboja dengan dikudetanya pemerintahan Naradom sianok oleh militer dan digantikan dengan Lon Nol. Pada masa pemerintah Lon Nol, Kamboja mengakhiri paham komunisnya dan berganti dengan paham liberal. Perubahan rezim tersebut membuat pemerintah Kamboja lebih memilih untuk memperbaiki hubungan dengan Thailand sehingga isu kuilpun kembali muncul. Pemerintah Thailand meminta Kamboja kembali berkompromi soal kawasan Kuil Preah Vihear.⁴⁵

Pada tahun 1975 pemerintahan Lon Nol jatuh ditangan kerajaan Khmer Merah. Sementara itu Laos dan Vietnam dikuasai komunis dan menyebabkan pemerintah Thailand dikelilingi oleh negara komunis. Hal ini menyebabkan pemerintah Thailand tidak ingin menekan isu kuil preah Vihear. Sampai tahun 1978 kerajaan Kmer merah berhasil ditaklukan oleh Vietnam, dan ancaman Vietnam di Kamboja menjadi masalah serius bagi Thailand. Namun dengan perjuangan geriliawan Khmer wilayah Kamboja berhasil didapatkan kembali dan Khmer mampu mengontrol atas wilayah kuil Preah Vihear sehingga pihak Kamboja dapat menguasai kuil ini.⁴⁶

⁴⁵ Lucas G.Barlow. *The Preah Vihear Temple ;What 's Claim.* (Thesis;Naval Postgraduate School,Monterey California. USA).2011,70

⁴⁶ *Ibid* ,72

Setelah kerajaan Kmer merah ditaklukan pada akhir 1998, Thailand dan Kamboja menunjukkan kesediaanya untuk berkompromi membahas mengenai isu kuil Preah Vihear bahkan Thailand diminta berkerjasama dengan Kamboja membersihkan ranjau darat pasca perang.⁴⁷ Pemerintahan Thailand dan Kamboja mulai bernegosiasi tentang masalah perbatasan hingga mencapai kesepakatan (MOU) dengan membentuk komisi gabungan (Joint Border Committee/ JBC). Namun Tidak sampai satu tahun perselisihan mengemuka. Kali ini perselisihan dipicu karena pihak Thailand mempertanyaan tentang validitas peta yang dibuat pada tahun 1907 dengan alasan peta baru harus kembali dibuat dan disepakati bersama. Kementrian luar negeri Thailand mengirimkan surat kepada Kamboja dengan menyatakan bahwa pihak Thailand tidak pernah mengakui peta tersebut dan Thailand tidak pernah memberikan kuil Preah Vihear ke pihak Kamboja.

Kerusuhan terjadi ketika seorang artis Thailand mengatakan didepan pers bahwa kuil Preah Vihear harus dikembalikan kepada Thailand. Kejadian ini memicu respon negatif terhadap Thailand. Masa membakar kedutaan besar Thailand dan menyerang beberapa perusahaan milik Thailand di Kamboja.⁴⁸ Suasana yang sama juga terjadi di Thailand, demonstran berunjuk rasa didepan kedutaan Kamboja di Bangkok dan menyerukan menutup akses kuil ke Kamboja.⁴⁹ Meskipun hubungan Thailand dan Kamboja sempat meregang, namun PM Thailand Thaksin Shinawatra

⁴⁷ Greg Torode, "Thailand to Clear Border Scourge," *South China Morning Post* (Hong Kong), October 30, 1998, (diakses pada via Newsbank Database: World News).

⁴⁸ Chandler, *A History of Cambodia*, 294

⁴⁹ Hinton, *Khmerness and The Thai Other: Violence, Discourse and Symbolism in the 2003 Anti-Thai Riots in Cambodia*. 2003, 450

dan PM Kamboja Hun Sen terus berusaha menghindari ketegangan. Hal ini disebabkan karena Kamboja merupakan mitra terpenting Thaksin pada saat itu.

2.2 Kronologi Munculnya Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja

Pascakudeta Thaksin Shinawatra

Konflik perbatasan Thailand-Kamboja mengemuka setelah UNESCO menetapkan kuil Preah Vihear menjadi situs warisan dunia. Pemberian status ini dipicu upaya Pemerintah Kamboja yang mengajukan proposal kepada UNESCO agar kuil Preah Vihear masuk menjadi situs warisan dunia UNESCO. Kuil Preah Vihear secara resmi masuk kedalam daftar situs warisan dunia (World heritage list) pada tanggal 7 juli 2008. Pemerintah Thailand tidak menerima keputusan tersebut karena Thailand menganggap masih terdapat ketidaksepahaman terhadap peta yang dimiliki Thailand dan Kamboja.

Akan tetapi pemerintah Thailand tidak lagi mempermasalahkan kepemilikan kuil Preah Vihear. Kali ini Thailand mempermasalahkan status kepemilikan tanah dibawah bangunan kuil Preah Vihear yang seluas 4,6 kilometer persegi itu. Pada bulan Agustus 2008, militer Thailand dan Kamboja dikerahkan ke wilayah perbatasan. Kedua negara mengerahkan hingga seribu pasukan militernya. Kontak senjata terjadi ketika delapan puluh militer Thailand menyusup masuk kewilayah kuil Preah Vihear. Hal ini memicu serangan dari pihak Kamboja. Dalam kejadian ini dilaporkan dua tentara Kamboja tewas dan lima tentara Thailand terluka.⁵⁰ Setelah insiden tersebut,

⁵⁰ Kompas. *Baku Tembak Pecah Diperbatasan*. 16 Oktober 2008
[http://www1.kompas.com/lipsus052009herculesread/2008/10/16/0759389/tentara Kamboja vs Thailand.dua tewas](http://www1.kompas.com/lipsus052009herculesread/2008/10/16/0759389/tentara_Kamboja_vs_Thailand.dua_tewas) diakses 25 April 2012

kedua belah pihak memperkuat posisi di perbatasan. Thailand dan Kamboja saling menambah pasukan militernya di wilayah perbatasan.

Pada tanggal 22 April 2011 pasukan Thailand dan Kamboja kembali terlibat baku tembak. Padahal dua minggu sebelum insiden, kedua negara sepakat untuk membentuk Joint Border committee (JBC) dengan mengedepankan jalur diplomasi untuk menyelesaikan sengketa. Penyebab dari bentrokan tersebut tidak diketahui. Namun masing-masing pihak saling menuduh untuk memulai serangan terlebih dahulu. Menurut Juru Bicara Kementerian Pertahanan Kamboja Chhum Socheat, pihak Thailand dengan sengaja menyusup masuk di wilayah kuil Preah Vihear.

Sementara dari pihak Thailand, Jenderal Prawit Wongsuwon menyatakan bahwa tentara Kamboja lah yang memulai terlebih dahulu sehingga pada akhirnya pihak Thailand juga membalasnya. Dalam insiden ini dilaporkan 21 orang tewas, diantaranya Sembilan tentara Thailand dan dua belas dari pihak Thailand termasuk satu orang warga sipil Thailand.⁵¹ Peristiwa ini merupakan insiden terburuk sepanjang konflik perbatasan Thailand-Kamboja. Atas peristiwa ini, pemerintah Thailand meminta warga sipil untuk mengungsi ke pos-pos pengamanan militer dan menjauh dari perbatasan kuil Preah Vihear.

⁵¹ <http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-politik/39-internasional-news/11637-sengketa-thailand-kamboja-kembali-pecah-bagaimana-analis-melihatnya> diakses pada 3 oktober 2012

2.3 Dinamika Kebijakan Luar Negeri Thailand Terhadap Kamboja

2.3.1. Era Pemerintahan Thaksin Shinawatra

Selama masa pemerintahan Thaksin Shinawatra⁵² hubungan Thailand dan Kamboja begitu akrab. Thaksin Shinawatra dinilai mempunyai kedekatan khusus dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Semenjak Thaksin menjabat sebagai perdana menteri Thailand, kedua negara tidak pernah terlibat perselisihan terkait permasalahan perbatasan di kawasan kuil Preah Vihear. Padahal sengketa kuil Preah Vihear diwariskan kepada pemimpin Thailand secara turun temurun. Akan tetapi tidak pada masa pemerintahan Thaksin Shinawatra. Pemerintahan Thaksin Shinawatra mampu memisahkan perselisihan yang memperebutkan kuil Preah Vihear.

Kebijakan luar negeri Thailand dibawah pemerintahan Thaksin Shinawatra menjadikan Kamboja mitra terpenting Thailand pada saat itu. Pemerintahnya sangat aktif menjalin kerjasama disektor investasi dan perusahaan swasta.⁵³ Para pengamat politik memperkirakan bahwa kebijakan luar negeri Thailand dikombinasikan dengan pengembangan bisnis perusahaan pribadi Thaksin di Kamboja. Diantaranya yakni

⁵² Thaksin Shinawatra merupakan mantan perdana menteri Thailand yang menjabat semenjak tahun 2001 sampai 2006. Thaksin dikudeta pada tanggal 20 september 2006 karena ketidakpuasan publik terhadap kinerjanya yang telah menjual 49% saham Shin Corp kepada Temasek Holding dari Singapura. Perusahaan tersebut dijual hanya dua hari setelah pemerintah mengubah peraturan rasio kepemilikan perusahaan asing dari 25% menjadi 49%. Pelaksanaan tender tersebut dinilai ada unsur tindakan korupsi oleh Thaksin Shinawatra. Gelombang aksi unjuk rasa menyebabkan kemundurannya dari perdana menteri Thailand. Setelah lengser dari kekuasaan perdana menteri Thailand, Thaksin diadili secara in absentia, pada tahun 2008 pengadilan Thailand menjatuhkan hukuman penjara kepada Thaksin Shinawatra. Namun Thaksin Shinawatra menolak tuduhan tersebut dan mengasingkan diri keluar dari Thailand. Pemerintahan Thailand tetap pada pendiriannya bahwa Thaksin harus bertanggung jawab dan telah melakukan pelanggaran hukum. Penolakan Thaksin terhadap keputusan pengadilan Thailand dianggap sebagai pembangkangan keputusan hukum tertinggi dan Thaksin dianggap sebagai boronon atas pelanggaran hukum Thailand.

⁵³ Duncan McCargo and Ukrist Pathmanond, *The Thaksinization of Thailand*, (NIAS Press 2005),52

perusahaan telepon genggam, demikian pula dengan Bank milik Thaksin untuk membiayai pembangunan jalan di Kamboja.⁵⁴ Maka dengan demikian Thaksin memiliki keuntungan untuk mempertahankan hubungan baik dengan Kamboja.

Terlepas dari motif tersebut, Kebijakan luar negeri Thaksin Shinawatra terus menjalin hubungan baik sekaligus mencegah terjadinya sengketa perbatasan yang memang menjadi masalah laten bagi hubungan kedua negara. Namun ketidakpastian politik melanda Thailand sejak kudeta⁵⁵ September 2006 yang menggulingkan pemerintahan Thaksin Shinawatra. Aktivis pro-demokrasi menuduh PM Thaksin korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Kudeta ini banyak mendapatkan kecaman dari sejumlah pemimpin negara dan kelompok pembela hak azasi manusia.

Akan tetapi berbeda dengan kudeta militer sebelumnya, Rakyat Thailand sendiri tampaknya mendukung langkah militer ini apalagi tindakan Shonti ini didukung oleh Raja Thailand. Jenderal Shonti Bironyarat menjadi kepala pemerintah Thailand menggantikan Thaksin Shinawatra. Sementara itu kudeta yang pertama di Thailand dalam 15 tahun terakhir ini justru terjadi kurang dari sebulan sebelum pemilihan umum direncanakan yang akan berlangsung pada 15 Oktober 2006.

Tidak lanjut dari kudeta tersebut, junta militer membatalkan pemilu, membatalkan konstitusi, membubarkan parlemen, melarang unjuk rasa,

⁵⁴ Premier, Hun Sen to Inspect Disputed Border," *The Nation* (Thailand), August 11, 2006.

⁵⁵ Kudeta adalah penggulingan kekuasaan pemerintah oleh sekelompok orang biasanya adalah pihak militer. Dalam tindakan kudeta aktor negara digulingkan sedangkan institusi pemerintah relative tidak berubah. Kudeta merupakan salah satu dari intervensi militer dalam politik. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan demokrasi, kudeta militer merupakan kemunduran bagi perkembangan demokrasi.

mengumumkan undang-undang keadaan darurat, menangkap para anggota kabinet dan memberlakukan sensor terhadap siaran lokal maupun internasional di Thailand.

⁵⁶Selain tuduhan korupsi, PM Thaksin Shinawatra juga dianggap sebagai pemimpin yang berkhianat kepada negara kerana telah menjual kuil Preah Vihear kepada Kamboja. Thaksin Shinawatra secara diam-diam telah memberikan dukungan terhadap upaya Kamboja dalam pemberian status kuil Preah Vihear menjadi situs warisan dunia kepada UNESCO. Banyak kalangan menyebutkan, PM Thaksin Shinawatra memberikan dukungan kepada Kamboja demi kepentingan pribadinya.

2.3.2. Era Pemerintahan Samak Sundarajev

Setelah lengser dari kursi Perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra digantikan oleh Samak Sundarajev. Perpolitikan Thailand berubah drastis karena kembali teman dekat Thaksin Shinawatra berkuasa. Samak Sundarajev merupakan rekan Thaksin Shinawatra yang semasa Thaksin berkuasa menjadi partai koalisinya. Kebijakan luar negeri Thailand pada era PM Samak Sundarajev masih menempatkan Kamboja sebagai mitra terpenting Thailand. PM Samak Sundarajev mengikuti jejak Thaksin Shinawatra untuk menjalin hubungan yang baik dengan Kamboja. Namun tidak cukup satu tahun masa pemerintahan Perdana Menteri Samak Sundarajev muncul tuduhan dari komisi pemilihan umum Thailand dengan menuding ketua parlemen Yongyut berlaku curang dalam pemilihan umum Desember 2007.⁵⁷

⁵⁶ Sri Issundari. *Latar Belakang Kudeta Militer Pada Masa PM Thaksin Shinawatra*. Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran. Yogyakarta. 2008, 203

⁵⁷ Massad Masrul. *Perkembangan Politik di Thailand ;Sistem Pemilu,Partai Politik dan Kudeta*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional; Universitas Pasundan. Bandung. 2012,94

Komisi pemilihan umum meminta agar kasus kecurangan ini dilanjutkan ke makamah agung. Apabila terbukti bersalah maka Yongyut akan diberhentikan dari jabatannya dan penyidikan akan terus dilanjutkan secara luas. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Samak Sundarajev apabila penyidikan itu ditindaklanjuti. Kembali peristiwa yang sama juga dialami oleh rekan Thaksin ini. Makamah Konstitusi memerintahkan PM Samak Sundarajev meletakkan jabatannya setelah terbukti bersalah melanggar konstitusi. Sembilan hakim secara bulat meminta Samak untuk mundur dari kursi perdana menteri Thailand.

PM Samak Sundarajev divonis pasal 267 undang-undang dasar dengan mendapatkan penghasilan dari sebuah perusahaan periklanan. Konstitusi melarang seorang perdana menteri memegang posisi dalam sebuah kerjasama dengan perusahaan atau kelompok bisnis dengan tujuan membagi keuntungan. Enam hakim menyatakan PM Samak Sundarajev terlibat sebagai pembawa acara disebuah perusahaan firma. Makamah konstitusi setuju secara bulat bahwa Samak telah melanggar konstitusi pasal 267. Makamah menuding Samak telah berbohong didepan pers dengan mengatakan bahwa dirinya tidak menerima uang dari perusahaan itu. Namun catatan pajak menyatakan bahwa Samak terus menerima pembayaran melalui rekeningnya.⁵⁸

Puncak dari aksi penentangan terhadap pemerintahan Samak Sundarajev terjadi kala Samak ikut mendukung upaya Kamboja dalam pemberian status warisan dunia untuk kuil Preah Vihear. Bentuk dukungan tersebut ditunjukkan dengan

⁵⁸ *Ibid*, 95

kunjungannya ke Kamboja pada tanggal 3 maret 2008. Samak bertemu dengan PM Hun Sen membahas mengenai kuil Preah Vihear. Hingga pada akhirnya kedua kepala pemerintahan mencapai kesepakatan melalui keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Thailand Noppadon Pattam dan Wakil Perdana Menteri Kamboja Sok An pada 17 Juni 2008.⁵⁹ Bersama dengan UNESCO dalam pertemuan di (Quebec, Kanada) menetapkan Preah Vihear sebagai salah satu situs Warisan Dunia yang secara resmi ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2008.⁶⁰

Semenjak itu, muncul kecaman dari rakyat Thailand kepada Samak Sundarajev dan Nappadom Pattam. Ribuan orang melakukan demonstrasi untuk menggulingkan pemerintahan Samak Sundarajev. Para demonstran menduduki kantor pemerintahan dan memaksa Samak untuk mundur dari kursi perdana menteri.⁶¹ Hingga pada tanggal 26 Agustus 2008, Para demonstran masih bertahan di kompleks pemerintahan, menolak meninggalkan kompleks pemerintahan sampai pemerintahan Samak benar-benar mundur. Akhirnya Samak terpaksa mundur dari jabatan perdana menteri dengan persetujuan Mahkamah konstitusi Thailand.

Setelah tersingkirnya Perdana Menteri Samak Sundarajev pada tahun 2008. Komisi pemilihan umum Thailand kembali mengadakan pemilihan Perdana menteri. Namun pemilihan perdana menteri Thailand hanya melalui pemilihan suara khusus di parlemen bukan melalui pemilihan umum sebagaimana mestinya. Dalam pemilihan

⁵⁹ The Temple of Preah Vihear. *Proposed of inscription on The Worl Heritage List UNESCO*. The council OF minister. Pnom Phen. Kingdom of Cambodia. 2008, 22

⁶⁰ Media Indonesia. *Preah Vihear Sumber Perseteruan Kedua Negara*. Senin 20 oktober 2008

⁶¹ Pavin Chachavalpongpun. *The Dispute Thai Cambodia Border*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore. 2011, 2

Dewan keamanan Nasional Thailand, lagi-lagi rekan partai koalisi Thaksin Shinawatra menang dalam pemilihan itu. Somchai Wongsawat berhasil mengalahkan Abhisit Vejjajiva dengan perbandingan 163 dari 298 suara.

Tanggal 2 Desember 2008, Pengadilan konstitusi Thailand memutuskan untuk melarang partai koalisi pemerintah terlibat dalam politik. Hal ini menyebabkan bubarnya pemerintahan koalisi. Pengadilan juga melarang Somchai dan mencopotnya dari jabatan perdana menteri. Ketika jelas bahwa partai koalisi pemerintahan dilarang ikut dalam pemilihan, maka pilihan suara di parlemen mengarah kepada partai yang dipimpin oleh Abhisit Vejjajiva. Abhisit secara resmi diangkat setelah melalui sebuah pungutan suara khusus di parlemen pada 15 Desember 2008.⁶²

2.3.3. Era Pemerintahan Abhisit Vejjajiva

Selama periode pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, hubungan Thailand-Kamboja terjebak kedalam konflik terbuka. Hubungan kedua negara ini merupakan yang terburuk sepanjang sejarahnya. Memanasnya hubungan kedua negara ditandai dengan berperangan di perbatasan Thailand-Kamboja tepatnya disekitar kawasan kuil Preah Vihear. Pemerintah Thailand mengklaim kepemilikan status tanah seluas 4,6 km persegi tepatnya berada dibawah bangunan kuil Preah Vihear.

Puncak ketegangan terjadi pada saat UNESCO menetapkan kuil Preah Vihear menjadi situs warisan dunia. Konfrontasi militer dan bentuk provokasi adalah kebijakan PM Abhisit Vejjajiva terhadap Kamboja. Ratusan pasukan militer Thailand

⁶² Massad Masrul. *Perkembangan politik di Thailand ;Sistem Pemilu, Partai Politik dan Kudeta*. Program studi ilmu hubungna internasional; universitas pasundan. Bandung. 2012,96

lengkap dengan peralatan militer dikerahkan di wilayah perbatasan. Sementara itu tindakan yang sama juga dilakukan oleh pihak Kamboja. Kementerian Pertahanan Kamboja telah mengerahkan puluhan tank dan peralatan tempur serta menyiagakan misil dan amunisi ke wilayah kuil Preah Vihear sehingga pasukan kedua militer saling berhadapan satu sama lain di wilayah perbatasan.

Kedua belah pihak terus bersiaga di sekitar wilayah kuil. Berbagai bentuk provokasi gencar dilakukan kedua belah pihak termasuk mengibarkan bendera negaranya di salah satu pagoda Preah Vihear. Seperti yang dikatakan pihak Kamboja bahwa militer Thailand berusaha untuk mengibarkan bendera Thailand di pagoda Keo Sikha Kiri Svarak yang berada di wilayah Kamboja dekat kuil Preah Vihear. Sebagaimana yang telah diingatkan jika tentara Thailand berani masuk ke wilayah Kamboja, maka pihaknya akan menggunakan hak membela diri untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorial.

Ketegangan antara Kamboja dan Thailand terkait perbatasan terjadi terus berlanjut setelah Thailand meminta Kamboja menurunkan bendera nasional mereka dari pagoda Wat Keo Sikha Kiri Svarak dekat kuil Preah Vihear. Dengan mengklaim bahwa pagoda itu berada di wilayah sengketa, namun Kamboja menolak hal itu. Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja mengumumkan deklarasi untuk menolak permintaan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva untuk menurunkan bendera di pagoda itu. Kementrian luar negeri Kamboja mengatakan bahwa menurut peta yang dibuat oleh Komisi Franco-Siamese antara periode 1905-1908, pagoda Keo Sikha Kiri Svara, dibangun oleh warga Kamboja

pada 1898, jelas terletak di wilayah, Kamboja sehingga bendera nasional mereka berhak untuk dikibarkan di sana.

Kementerian pertahanan Kamboja menyebut pernyataan Perdana Menteri Thailand itu dan latihan militer Thailand di dekat perbatasan Kamboja merupakan provokasi dan merupakan pertanda untuk sebuah langkah agresi terhadap Kamboja di masa datang. Seminggu setelah penetapan posisi militer di wilayah perbatasan, perang tidak bisa lagi dielakan dan kedua militer terlibat bentrok. Peristiwa ini menewaskan dua tentara Kamboja dan lima tentara Thailand terluka.⁶³

Penyelesaian Sengketa Perbatasan Dilakukan Melalui Jalur Bilateral

Sejak memanasnya konflik perbatasan Thailand-Kamboja, kedua negara sebetulnya telah melakukan pendekatan dialog untuk menyelesaikan sengketa. Pada awalnya Thailand dan Kamboja sepakat untuk tidak membawa permasalahan ini pada pihak luar. Seperti yang dikatakan oleh PM Abhisit bahwa Thailand dan Kamboja sepakat untuk melakukan perundingan secara bilateral dan tidak ingin melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.⁶⁴ Lebih lanjut Abhisit mengatakan bahwa permasalahan tersebut hanya menyangkut masalah Thailand dan Kamboja dan Abhisit yakin bahwa melalui perundingan bilateral maka akan mencapai hasilnya.

⁶³ Kompas. *Baku Tembak Pecah Diperbatasan*. 16 oktober 2008
http://www1.kompas.com/lipsus052009herculesread/2008/10/16/0759389/tentara_kamboja_vs_thailand.dua_tewas_diakses_25_April_2012

⁶⁴ Media Indonesia. *Keterlibatan Pihak Luar Dalam Penyelesaian Sengketa Ditolak*. senin 20 oktober 2008

Kesepakatan tersebut juga diungkapkan oleh PM Hun Sen, bahwa pihak luar belum saatnya untuk terlibat karena Thailand dan Kamboja sepakat untuk melanjutkan negosiasi. Pernyataan Hun Sen tersebut keluar setelah sehari sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kesiapan Indonesia menjadi penengah dalam perundingan damai antarkedua negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu. Namun upaya untuk melakukan pembicaraan secara bilateral mengalami hambatan karena kedua kepala pemerintahan sekali lagi menunda pertemuan. Sedangkan suasana diperbatasan semakin mencekam karena kedua pihak militer semakin banyak lagi dikerahkan diwilayah kuil Preah Vihear.

Pemerintah Thailand Menolak Mediasi ASEAN

Dengan telah disahkannya Piagam ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008, maka Negara-Negara ASEAN telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog, konsultasi dan negosiasi, sebagaimana diatur dalam BabVIII Piagam ASEAN. Pihak-pihak yang terkait dalam sengketa dapat meminta Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN untuk bertindak *ex-officio* dalam rangka memberikan jasa-jasa baik, konsiliasi atau mediasi. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan, maka perkara ini akan diajukan ke level KTT ASEAN.⁶⁵

Pengesahan piagam ASEAN tersebut terjadi pada saat Thailand dan Kamboja sedang mengalami bentrokan di perbatasan. Namun dengan gagalnya kedua kepala pemerintahan Thailand dan Kamboja untuk melakukan pertemuan, maka inisiatif

⁶⁵ Haris Havas Oengroseno. *Sengketa Perbatasan Antar ASEAN*. (DirektoratJenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta).2009, 9

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua ASEAN kembali menawarkan keterlibatan ASEAN sebagai mediator dalam upaya menyelesaikan ketegangan kedua negara. Disela-sela pertemuan KTT ASEAN Perdana Menteri Thailand akhirnya bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja untuk pertama kalinya sejak pecahnya kembali konflik di perbatasan dua negara itu. Pertemuan antara Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva dan Perdana Menteri Hun Sen berlangsung hari Minggu pagi di Jakarta, dan di hadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁶⁶

Selesai pertemuan Hun Sen mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Yudhoyono telah menyampaikan usulan bahwa Indonesia sebagai ketua ASEAN siap menengahi perundingan Thailand-Kamboja. PM Hun Sen menambahkan bahwa pihaknya setuju akan usulan Indonesia namun pihak Thailand menanggapinya dengan lain. Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva menyatakan menolak mediasi⁶⁷ ASEAN dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Kamboja. Dikutip dari *The Nation*, Abhisit memilih untuk melakukan pembicaraan

⁶⁶ Bbc news. PM Thailand dan PM Kamboja bertemu
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/05/110508_thailand_kamboja.shtml diakses pada 12 Oktober 2012

⁶⁷ Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, dan membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai upaya penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak

bilateral dibandingkan dengan keterlibatan mediator yang secara tradisi dilakukan oleh Ketua Asean yang dijabat oleh Indonesia.⁶⁸

Sedangkan alasan Thailand menolak ikut sertanya ASEAN dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dapat dilihat sebagai berikut; seperti yang penulis kutip dalam Skripsi Herjuno Hendri dengan judul“, *Strategi Thailand dalam menghadapi masalah perebutan wilayah dengan Kamboja (studi kasus wilayah disekitar kuil preah vihear)* menyebutkan⁶⁹

1. Tidak berfungsinya High Council atau dewan agung dalam treaty of Amity and cooperation sebagai badan yang bisa menyelesaikan konflik internal ASEAN. Walaupun ASEAN telah memiliki Treaty of Amity and cooperation in southeast asia (TAC) sebagai code of conduct dalam penyelesaian konflik diperbatasan melalui dewan agung (high council), namun sampai sekarang negara anggota ASEAN justru lebih percaya kepada pihak PBB. Kasus kuil Preah Vihear telah menyebabkan Kamboja meminta Bantuan kepada PBB padahal semulanya Kamboja meminta bantuan ASEAN.
2. Tidak pernah membahas masalah sengketa dalam pertemuan KTT ASEAN. Segala bentuk konflik perbatasan antara negara anggota, hampir tidak ada dibahas di dalam KTT ASEAN. Hal ini harus dicapai dalam

⁶⁸ Algooth putranto. *RI ditendang dari kamboja*, 14 februari 2011. http://en.bisnis.com/article/ri_ditendang_dari_kamboja. diakses 10 maret 2012 pukul 13.20

⁶⁹ Julius hendri“, *Strategi Thailand Dalam Menghadapi Masalah Perebutan Wilayah Dengan Kamboja (studi kasus wilayah disekitar kuil preah vihear)*, (S.IP ;skripsi, Universitas Riau; Pekanbaru). 2011, 73

kekuasaan dan wewenang negara anggota ASEAN yang memerlukan tidak saja kemajuan politik tetapi juga itikat baik, pengertian dan kepercayaan bahwa tercapainya penyelesaian damai merupakan kepentingan ASEAN jangka panjang. Namun pada kenyataannya sekarang ini ASEAN cenderung tidak mempunyai kapabilitas untuk itu, karena dalam KTT ASEAN yang dilaksanakan, para anggota ASEAN tidak membahas mengenai konflik yang sedang terjadi sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan.

3. Masih diadopsinya prinsip *Non-Interference* ASEAN. Prinsip tidak mencampuri urusan negara lain atau *doctrin non interference* merupakan salah satu fondasi paling kuat menopang kelangsungan ASEAN. Dengan berlandaskan pada doktrin ini ASEAN dapat memelihara hubungan baik antar sesama anggota. Dari sudut pandang negara anggota doktrin ini muncul sebagai bentuk kesadaran masing-masing negara anggota yang pada tingkat domestik masih rentan terhadap ancaman internal berupa kerusuhan hingga kudeta. *Doctrin non interference* ini menjadi alasan bagi negara anggota ASEAN untuk berusaha agar tidak melakukan penilaian kritis terhadap kebijakan luar negerinya.

Menolak Tim pemantau (*Observer*) ASEAN ke wilayah perbatasan

Walaupun penyelesaian konflik dengan mendudukkan Thailand dan Kamboja secara bersama belum menunjukkan hasil, Indonesia sebagai ketua ASEAN melalui kementerian luar negeri terus mencari jalan dengan mengadakan pertemuan informal

secara terpisah untuk Thailand dan Kamboja. Setidaknya Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan Kamboja karena PM Hun Sen telah menunjukkan itikad baik dengan bersedia mendatangkan menteri luar negerinya pada pertemuan JBC⁷⁰ (Joint Border Committee), dan juga bersedia menerima tim pemantau dari Indonesia.

Akan tetapi langkah ini lagi-lagi ditolak oleh pihak Thailand. Thailand kembali menunjukkan sikap antagonisnya terhadap ASEAN. *Joint Border Committee* (JBC) yang sedianya diadakan pada 7-8 April 2011 masih terhambat dengan sikap Thailand yang tidak konsisten. Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengatakan, peninjau Indonesia tidak dapat ditempatkan di wilayah sengketa dekat candi Preah Vihear. Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong menyampaikan kekecewaannya di Jakarta. Pasalnya, pemerintah Bangkok menolak untuk menempatkan peninjau Indonesia di wilayah sengketa dengan mengatakan, bahwa Thailand harus menghargai peran Indonesia dalam perundingan karena pemerintah Indonesia telah mendapat dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁷¹

Penolakan tidak hanya datang dari Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva namun kali ini Pihak militer Thailand menampakan reaksi keras terhadap usulan ASEAN untuk mengirimkan tim *observer* ke wilayah perbatasan. Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwan juga mengatakan bahwa militer Thailand tidak akan

⁷⁰ Pembentukan JBC (*general/joint border committee*) dalam konteks bilateral, umumnya dibentuk guna membahas berbagai kerjasama perbatasan antarnegara

⁷¹ Okezone. PM Thailand;peninjau Indonesia tidak dapat ditempatkan diwilayah perbatasan. <http://okezone.com/article/PM-Thailand-peninjaw-Indonesia-tidak-dapat-ditempatkan-diperbatasan>.diakses 10 maret 2012

menghadiri JBC tersebut jika pertemuannya diadakan di Jakarta. Pihak militer Thailand melarang kehadiran tim pemantau dari Indonesia di wilayah yang disengketakan karena dianggap sebagai wujud intervensi pihak luar. Dalam statement jenderal Prawit Wongsuwon seperti yang penulis kutip di the *Bangkok post* bahwa "Kami tidak akan pergi. Kita tidak ingin pertemuan yang akan diadakan di negara ketiga. Tentara dari kedua negara sangat dekat satu sama lain. Pembicaraan harus antara tentara dari dua negara saja ,dan pihak ketiga tidak harus terlibat."⁷² Sebelumnya pihak militer tidak pernah menampilkan reaksi seperti itu, namun kali ini secara terang-terangan menegaskan bahwa tidak ada pihak ketiga yang perlu dilibatkan dalam rapat umum Komite Perbatasan (*General border committee meeting*) dan tim pemantau Indonesia tidak boleh berada di wilayah perbatasan kuil Preah Vihear.⁷³

Sepertinya PM Abhisit Vejjajiva bersama dengan pihak militer tidak sedikitpun memberikan celah untuk ASEAN dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. Pernyataan terbaru PM Abhisit Vejjajiva yang menyiratkan bahwa Thailand tetap bertahan untuk menggunakan jalur bilateral seolah-olah tidak bisa lagi ditawarkan. Thailand bersikeras tidak ingin melibatkan pihak luar dan penyelesaiannya hanya dilakukan secara bilateral dengan Kamboja.

⁷² Wassana Nanuam, "'No' to GBC meeting in Indonesia", *The Bangkok Post*, 22 March 2011

⁷³ Sheldon Simon. *US-South asia relation dismay at Thailand-Cabodia skimilis*, Arizona state university. USA. 2011,2

BAB III

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI THAILAND DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN THAILAND-KAMBOJA

Selama masa pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, hubungan Thailand-Kamboja memburuk. Dibawah pemerintahan Abhisit Vejjajiva sengketa kawasan kuil Preah Vihear ditekan sedemikian rupa yang pada akhirnya berujung pada peperangan. Keadaan semakin diperparah dengan bersiaganya pasukan militer kedua negara itu. Hal ini yang menyebabkan tingginya potensial konflik militer. Sementara itu, upaya penyelesaian sengketa perbatasan juga dilakukan dengan cara militer. Seperti pemaparan pada Bab 2, dimasa pemerintahan PM Abhisit Vejjajiva penyelesaian sengketa perbatasan dilakukan dengan cara-cara militer. Pemerintahan Thailand juga menolak mediasi ASEAN, hal ini berupa ketidaksediaan untuk menghadiri JBC (Joint Border Committe) di Jakarta serta menolak tim pengamat/*observer* ASEAN untuk ditempatkan di wilayah perbatasan.

Akan tetapi hubungan Thailand-Kamboja kembali membaik setelah lengsernya kekuasaan PM Abhisit vejjajiva dari kursi perdana menteri. PM Abhisit Vejjajiva digantikan oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Semenjak Yingluck Shinawatra menjadi Perdana menteri Thailand, ketegangan kedua negara sudah mereda. Terpilihnya Yingluck Shinawatra dalam pemilu Thailand mendapat sambutan positif dunia internasional dan pasar modal. Sekjen PBB Ban Ki-moon menyambut baik hasil pemilu dan menyerukan semua pihak untuk "menghormati kehendak rakyat Thailand seperti yang diungkapkan melalui proses demokrasi." Aung San Su Kyi mengucapkan selamat kepada Yingluck, memuji pemilu sebagai

"bebas dan adil, dan diharapkan hubungan antara Myanmar dan Thailand menjadi lebih baik.⁷⁴ Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong juga menyambut kemenangan Yingluck Shinawatra. Hor Namhong berharap dengan terpilihnya pemimpin baru di Thailand, kedua negara bisa segera menyelesaikan ketegangan perbatasan.

Tak hanya menteri luar negeri, Khususnya Perdana Menteri Kamboja Hun Sen juga sangat gembira dengan kemenangan Yingluck Shinawatra dalam pemilihan perdana menteri Thailand. Pada Jumat 5 Agustus 2011, PM Hun Sen menulis surat untuk mengucapkan selamat kepada Yingluck Shinawatra karena terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand yang ke-28 dan menjadi wanita pertama Perdana Menteri Thailand. Dalam suratnya yang dikirim ke Yingluck Shinawatra, seperti yang penulis kutip Hun Sen mengatakan,

"Atas nama pemerintah dan rakyat Kamboja, saya dengan tulus mengungkapkan kegembiraannya atas terpilihnya yang mulia oleh anggota parlemen menjadi Perdana Menteri Thailand. "Saya optimistis melalui komitmen bersama, Yang Mulia dan saya akan dapat mengembalikan persahabatan tradisional kita, menjadi tetangga yang baik, dan mampu menggalang kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat kedua negara kita," "Saya siap untuk bekerja sama dengan Yang Mulia, melayani kepentingan kedua negara dan rakyat kita, serta mencari jalan terbaik untuk memecahkan semua masalah secara damai

⁷⁴ Intathep, Lamphai (6 July 2011). "Suu Kyi welcomes outcome". *Bangkok Post*. AFP.

*dalam rangka membawa harmonisasi untuk masa depan bangsa kita. Berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini.*⁷⁵

Ungkapan PM Hun Sen ini kemudian direspon oleh PM Yingluck Shinawatra. Jelas saja, sesaat setelah dilantiknya Yingluck Shinawatra menjadi perdana menteri Thailand, PM Yingluck segera melakukan rencana untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Kamboja. PM Yingluck Shinawatra memulai dengan mengunjungi negara anggota ASEAN. Kunjungan ini bisa dikatakan sebagai langkah awal dari kebijakan luar negeri Thailand. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama sekaligus sebagai perkenalannya dengan pemimpin negara di kawasan asia tenggara.

Brunai Darusalam adalah negara pertama yang Beliau kunjungi. Dalam sebuah wawancara dengan The Brunei Times selama kunjungan tersebut, mantan Menteri Thailand Luar Negeri Kasit Piromya mengatakan bahwa mengunjungi Brunei adalah suatu keharusan.⁷⁶ Perdana menteri Yingluck bertemu dengan Yang mulia sultan membahas peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi untuk kepentingan kedua negara. Indonesia adalah negara kedua setelah Brunai Darusalam. PM Yingluck Shinawatra sampai di Jakarta pada senin 12 September 2011. Dalam kunjungannya selama sehari ke Indonesia, Yingluck membicarakan hubungan

⁷⁵ Pernyataan Hun Sen ini diakses <http://internasional.kompas.com/read/2011/08/06/0149hunsen-beri-selamat-yingluckshinawatra> diakses 12 Desember 2012

⁷⁶<http://www.bt.com.bn/news-national/2011/09/03/pm-yingluck-expected-visit-brunei> diakses pada 17 Desember 2012

bilateral kedua negara serta isu-isu ASEAN termasuk masalah perbatasan Thailand-Kamboja.⁷⁷

Berberapa analist menilai bahwa kunjungan PM Yingluck Shinawatra ke Indonesia dapat dimaknai bahwa Indonesia sebagai *Chair of ASEAN*, diharapkan bisa mendukung Thailand dalam rangka penyelesaian konflik perbatasan dengan Kamboja yaitu sengketa tanah di sekitar Kuil Preah Vihear sejak 2008. Terlebih lagi Pemerintah Indonesia sangat aktif didalam menyelesaikan sengketa perbatasan kedua negara itu. Bahkan Pemerintah Indonesia terus meyakinkan PBB agar konflik tersebut dapat diselesaikan di tingkat ASEAN.

Kedua, apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengingat Indonesia juga berperan dalam menyelesaikan masalah di Thailand Selatan yang sempat bergejolak lewat langkah politik yang damai dan mendukung keutuhan wilayah teritorialnya. Ketiga; memperkuat kerja sama yang sudah terjalin selama 62 tahun sejak berdirinya ASEAN, antara lain bidang keamanan (isu terorisme dan illegal fishing), bidang teknologi pertanian khususnya ketahanan pangan, dan bidang perdagangan yang sempat meningkat 34 % dari 2010. Keempat; dukungan moral terhadap Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2011 November di Bali. Pertemuan ini sangat bermakna bagi Thailand di bawah kepemimpinan PM Yingluck Shinawatra dan Thailand akan terus mengawal dan berpartisipasi hingga terwujudnya Komunitas ASEAN 2015.

⁷⁷ http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/09/110912_yngluck.shtml diakses pada 17 Desember 2012

Setelah pertemuan sehari dengan presiden SBY, PM Yingluck Shinawatra segera berangkat ke Kamboja untuk bertemu dengan PM Hun Sen. Pada saat pertemuan inilah, kedua pemimpin negara membahas seputar ketegangan yang terjadi. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan damai. Walaupun kesepakatan itu dalam bentuk lisan dan tidak tertulis, namun sudah ada langkah konkrit yang telah dilakukan. Dibawah pemerintahan baru ini, Yingluck Shinawatra mampu memisahkan peselisihan kedua negara melalui serangkaian upaya penyelesaian sengketa perbatasan. Kebijakan luar negeri Thailand dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan pun dirubah dengan cara yang lebih baik. Berikut adalah kebijakan luar negeri Thailand pada masa pemerintahan Yingluck Shinawatra sehubungan dengan upaya penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja;

3.1 Penyelesaian sengketa perbatasan dilakukan dengan keterlibatan ASEAN dalam penyelesaian konflik

Menteri luar negeri Indonesia, Marti Natalegawa mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan Indonesia diperkuat dengan peranya sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja. Pernyataan tersebut keluar setelah kunjungan kenegaraan Yingluck Shinawatra pada bulan September 2011 di Jakarta. Dalam kunjungan kenegaraan tersebut PM Yingluck Shinawatra bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua pemimpin melakukan pertemuan bilateral membahas peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara, investasi dan membahas masalah perbatasan Thailand-Kamboja. Terkait dengan masalah perebutan kawasan kuil Preah Vihear, PM Yingluck menegaskan bahwa

pihak Thailand berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mengedepankan hubungan persahabatan dengan negara ASEAN.

Pernyataan PM Yingluck tersebut disambut baik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena sesuai dengan harapan ASEAN bahwa sengketa perbatasan dapat diselesaikan dengan bijak dan damai. Presiden SBY juga mengungkapkan kegembiraannya atas perkembangan positif sehubungan dengan sengketa perbatasan Thailand-Kamboja. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia selaku ketua ASEAN turut berperan aktif menengahi konflik perbatasan. Pemerintah Indonesiapun juga sudah mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan konflik kedua negara ASEAN ini. Maka dapat dikatakan bahwa peran dan posisi Indonesia sangat penting untuk mempercepat proses perdamaian Thailand-Kamboja.

Sehubungan dengan posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2011-2012 PM Yingluck Shinawatra mengungkapkan bahwa pihak Thailand menyambut baik kepemimpinan Indonesia. PM Yingluck Shinawatra juga mengungkapkan bahwa pemerintahan Thailand sangat menghormati upaya Indonesia sehubungan dengan kapasitas Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam menyelesaikan sengketa perbatasan Thailand-Kamboja. Ucapan terima kasihpun juga disampaikan Yingluck Shinawatra kepada Presiden SBY disaat pertemuan berlangsung.⁷⁸ Untuk selanjutnya upaya penyelesaian sengketa perbatasan terus dilakukan dan Indonesia tetap terlibat dalam

⁷⁸ <http://erabaru.net/nasional/50-politik/27767-indonesia-komitmen-selesaikan-konflik-thailand-kamboja> diakses pada 10 desember 2012

proses penyelesaian itu. Peran Indonesia sebagai ketua ASEAN sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah perbatasan, ungkap Yingluck.⁷⁹ Dalam hal ini, pemerintahan Indonesia sudah mendapat kepercayaan untuk memainkan perannya di level regional ASEAN. Selama ini upaya Indonesia terkendala oleh pemerintahan Abhisit Vejjajiva ditambah lagi dengan intervensi pihak militer Thailand didalam perpolitikan Thailand . Pemerintahan Indonesia sendiri sudah mendapat dukungan dari PM Yingluck Shinawatra untuk ikut serta dalam penyelesaian sengketa. Maka dengan demikian, Indonesia sebagai ketua ASEAN telah kontidirekatkan untuk memberitahukan kepada PBB, khususnya Dewan Keamanan yang masalah ini bisa diselesaikan di tingkat ASEAN terutama oleh Thailand dan Kamboja. Kali ini Indonesia memperoleh peluang besar untuk melakukan upaya mempercepat proses perdamaian.

Dalam jumpa pesnya di Jakarta bersama dengan PM Yingluck Shinawatra, Presiden SBY sangat mendukung upaya politik damai Thailand untuk mengatasi masalah perbatasan Thailand-Kamboja. Terlebih lagi Yingluck Shinawatra dikabarkan akan mengunjungi Kamboja setelah melakukan kunjunganya ke Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik rencana tersebut karena kunjungan ini adalah babak baru untuk memulai perundingan damai dengan Kamboja. PM Yingluck Shinawatra sendiri berkunjung selama tiga hari di Kamboja.

⁷⁹ Waging Peace; ASEAN And The Cambodia-Border. Crisis Group Asia Report N 215. 6 December 2011, 32

Memanfaatkan kesempatan tersebut Indonesia segera mengirim tim *Observer* untuk ditempatkan di wilayah perbatasan Thailand- Kamboja didekat kawasan kuil Preah Vihear. Sebelumnya berdasarkan pada hasil pertemuan informal para tingkat menteri luar negeri ASEAN di Jakarta pada 22 Februari 2011 dan atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB, Indonesia pernah membentuk Tim Pemantau atau IOT (Indonesia *Observer* Team) untuk wilayah perbatasan kuil Preah Vihear. Upaya tersebut kemudian dibenarkan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono kepada wartawan disela ASEAN *Chiefs Of Defense Forces Informal Meeting* bahwa pemerintahan Indonesia diminta untuk menjadi tim *observer* di wilayah kuil Preah Vihear namun langkah tersebut ditolak oleh PM Abhisit Vejjajiva berserta dengan para militernya.⁸⁰

3.2 Pemerintah Thailand-Kamboja Sepakat Membentuk Regional Border Committee dan GBC (General Border Committee)

General Yutthasak Sasiprapa, Menteri Pertahanan Thailand, menyampaikan bahwa Perdana Menteri Kamboja dan Menteri Pertahanan Tea Banh telah mengirimkan undangan memintanya untuk melanjutkan dialog membahas penyelesaian sengketa perbatasan. Di Phnom Penh, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan Indonesia sebagai mediator harus hadir selama pembicaraan pada area 17 kilometer persegi yang disengketakan di sekitar kuil Preah Vihear. Sebelum itu telah

⁸⁰ http://www.indosiar.com/berita-terkini/tunggu-persetujuan-thailand---kamboja_90097.html diakses pada 10 Desember 2012

diadakan pertemuan RBC (Regional Border Committee) di Hotel Sima Thani Ratchasima Thailand Nakhon provinsi 23-24 Agustus 2011.⁸¹ Pertemuan RBC tersebut diketuai Komandan Pasukan Thailand II Letnan Jenderal Tawatchai Samutsakhon dan Deputi Kepala Staf Militer Kamboja yang juga menjabat sebagai Komandan Pasukan Thailand IV Letnan Jendral Chea Mon.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Deputi Menteri Pertahanan Kamboja Jendral Neang Pha. Dalam Pertemuan RBC ini mendiskusikan 15 isu termasuk di antaranya masalah keamanan di perbatasan Thailand dan Kamboja. Dalam pertemuan, Jenderal Yuthasak mengatakan bahwa tanpa mengadakan pertemuan GBC, kedua pihak tidak akan mampu berbicara tentang penarikan pasukan dan memungkinkan pengamat Indonesia masuk ke daerah itu. Lebih lanjut Jenderal Yuthasak tidak memiliki pilihan selain mematuhi putusan Mahkamah Internasional, namun harus dipastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan *win-win solution*. Sebenarnya upaya tersebut adalah komitmen dari PM Yingluck Shinawatra dan PM Hun Sen yang memerintahkan menteri Pertahan Kedua negara berdialog.

Pertemuan tersebut berakhir dengan kondusif sesuai dengan harapan bersama. Kedua pihak militer menghasilkan perjanjian kerja sama militer antar kedua negara untuk keamanan wilayah perbatasan, dan juga menghasilkan kerangka kerja untuk pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC/*General Border Committee*) antara Thailand dan Kamboja.⁸² *General Border Committee/ GBC* sangat diperlukan untuk

⁸¹ <http://englishpeople.com/90777/7570450.html> diakses 10 Desember 2012

⁸² <http://international.okezone.com/read/2011/08/25/411/496176/pertemuan-thailand-kamboja-berakhir-kondusif> diakses pada 10 Desember 2012

berdialog mempercepat perdamaian kedua negara. Upaya pembentukan GBC ini adalah langkah terbaik Thailand dan Kamboja untuk meredam ketegangan karena pada saat pertemuan inilah telah disepakati kerangka acuan atau tata cara penarikan pasukan militer kedua negara. Hasil pertemuan dapat digunakan oleh menteri pertahanan dalam pertemuan GBC yang diselenggarakan di Kamboja.

Selanjutnya pada saat pertemuan General Border Committee diadakan di Phnom Penh pada tanggal 8 September 2011, Thailand dan Kamboja telah menyepakati untuk menarik masing-masing pasukan dari zona demiliterisasi dekat kawasan kuil Preah Vihear. Indonesia sudah disepakati sebagai peninjau penarikan pasukan di wilayah Thailand maupun Kamboja. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Thani Thongpak memberi informasi kepada koran *The Nation* tentang kesepakatan GBC itu. Katanya, Menteri Pertahanan Thailand, Yuthasak Sasiprapha yang sudah bersalaman dengan Menhan Kamboja Tea Banh, mengatakan akan membawa isu ini untuk mendapat persetujuan kabinet Yingluck Shinawatra.

Kedua negara ini sudah akur dan sepakat segera membentuk kelompok kerja bersama agar bisa cepat menarik pasukan masing-masing dari zona demiliterisasi. Sebuah pernyataan bersama setelah selesainya pertemuan GBC menyebutkan, Thailand dan Kamboja sepakat segera membentuk tim peninjau gabungan yang terdiri dari pihak Thailand, Kamboja dan Indonesia yang akan mengawasi penarikan seluruh pasukan. GBC dan RBC telah tertunda selama pemerintahan Abhisit sebagai dampak dari memburuknya hubungan antara kedua negara.

3.3 Pemerintah Thailand-Kamboja Tarik Pasukan Militer Dari Wilayah Perbatasan

Semenjak UNESCO menetapkan kuil Preah Vihear terdaftar kedalam situs warisan dunia pada 7 juli 2008, pemerintah Thailand mengerahkan pasukan militernya ke wilayah perbatasan. Mulanya Thailand mengirim sekitar seribu pasukan militernya di wilayah dekat kuil Preah Vihear. Kemudian pasukan militer semakin banyak lagi dikirim lengkap dengan peralatan tempur. Sementara itu pihak Kambojapun juga memerintahkan pasukanya untuk bersiaga di wilayah kuil hingga kedua belah pihak saling berhadapan satu sama lainnya. Kejadian ini menimbulkan ketegangan dari kedua belah pihak bahkan perang sempat berberapa kali terjadi. Terakhir kali pasukan militer kedua negara terlibat bentrok pada April 2011.

Dengan menempatkan pasukan militer kedua negara di perbatasan tentunya mengundang kekhawatiran oleh banyak pihak khususnya ASEAN sebab dengan menempatkan pasukan militer ke wilayah perbatasan maka potensi konflik untuk berperang lebih besar jika dibandingkan dengan kedua belah pihak mengurungkan niatnya untuk mengerahkan pasukan militer. Karena penarikan mundur pasukan merupakan syarat mutlak terciptanya situasi kondusif. Sebelum itu, Pemerintahan Kamboja pernah meminta pemerintahan Thailand untuk menarik pasukan dari wilayah perbatasan, namun gagal dan Untuk pertama kalinya pihak Kamboja melaporkan kepada Pengadilan Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (ICJ) dengan mengatakan bahwa pemerintahan Thailand dengan sengaja mengerahkan pasukannya ke wilayah perbatasan untuk memprovokasi keadaan. Sementara itu

pihak militer Thailand mengatakan bahwa pertempuran diprovokasi dalam rangka untuk membawa kasus ini ke pengadilan Internasional dan Kamboja sebagai penggugat telah membuat satu strategi.

Pengaduan ini membuat pengadilan internasional memanggil perwakilan Thailand dan Kamboja untuk menyerukan penarikan pasukan kedua negara. Akhirnya kedua menteri luar negeri bertemu di pengadilan internasional, di Belanda. Pemerintahan Kamboja memulai tuntutan dengan mendesak Thailand agar menarik pasukan dari wilayah sekitar Candi Preah Vihear yang menjadi sengketa. Di depan panel hakim yang berjumlah enam belas orang di Den Haag. Hor Namnong mengungkapkan bahwa Thailand diharuskan untuk menarik pasukannya di wilayah candi (Preah Vihear).⁸³ Sementara Pemerintah Thailand meresponsnya dengan meminta ICJ menghapus kasus tersebut dari daftar pengadilan dan kembali menuntut agar pasukan Kamboja terlebih dahulu menarik pasukan militernya dari wilayah perbatasan. Menteri luar negeri Thailand, Kasit Piroya mengatakan bahwa penarikan pasukan Thailand dari perbatasan tidak bisa ditawar sebelum pasukan Kamboja yang terlebih dahulu melakukannya.⁸⁴

Pertemuan di pengadilan internasional tersebut sebenarnya sempat mencapai hasil walaupun menteri luar negeri bersikeras dengan pandangannya masing-masing.

⁸³Okezone. Kamboja mulai perlawanan dengan Thailand
<http://autos.okezone.com/read/2011/05/31/411/463018/kamboja-mulai-perlawanan-dengan-thailand-di-pbb> diakses 10 juni 2012

⁸⁴ Julius hendri", *Strategi Thailand Dalam Menghadapi Masalah Perebutan Wilayah Dengan Kamboja(studi kasus wilayah disekitar kuil preah vihear)*, (S.IP ;skripsi, Universitas Riau; Pekanbaru). 2011, 80

Pengadilan internasional memutuskan agar kedua negara segera menarik pasukan mereka dari perbatasan yang disengketakan. ICJ juga meminta kedua belah pihak untuk menahan diri mengerahkan pasukan di wilayah tersebut. Lima belas hakim pengadilan internasional secara bulat setuju meminta Thailand untuk menarik pasukannya dari wilayah perbatasan.⁸⁵ Awalnya Thailand berkomitmen untuk mematuhi keputusan tersebut namun bentrokan kembali terjadi kemudian berlanjut hingga April 2011. Peristiwa ini menyebabkan korban tewas mencapai 21 orang.

Pada akhirnya PBB mengeluarkan peringatan kepada kedua negara untuk menghentikan perang dan meminta gencatan senjata permanen. PBB kembali menyerukan agar kedua pihak militer ditarik dari wilayah perbatasan. kedua belah pihak harus melanjutkan kerja sama dengan ASEAN khususnya, memungkinkan pengamat memasuki zona demiliterisasi. PM Hun Sen menambahkan bahwa tim pengamat Indonesia juga harus ditempatkan di sekitar kuil Preah Vihear.⁸⁶ Namun imbauan gencatan senjata itu tidak digubris oleh pihak Thailand dan kedua militer terus terlibat pertempuran. Sampai pada akhirnya terjadi peralihan kekuasaan pemerintahan Thailand oleh Yingluck Shinawatra. PM Yingluck Shinawatra dan PM Hun Sen sepakat untuk menarik pasukan militer dari wilayah perbatasan kuil Preah Vihear.

⁸⁵ Request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Request for the Indication of Provisional Measures”, order, ICJ, 18 July 2011

⁸⁶ Daniel Ten Kate and Anuchit Nguyen, “Thailand to comply with Cambodian temple DMZ imposed by UN”, Bloomberg, 18 July 2011. Crisis Group interviews, journalist, diplomat, Phnom enh, , 7 October 2011. “Hun Sen: Thailand must honour the court decision; Indonesian observers are a must”, press statement, Press and Quick Reaction Unit, 22 July 2011.

Sebelum diadakanya GBC, terlebih dahulu PM Yingluck berkunjung ke Kamboja untuk bertemu PM Hun Sen. Kehadiran PM Yingluck Shinawatra adalah usaha nyata Thailand memulihkan hubungan kedua negara yang rusak akibat konflik Preah Vihear. Kunjungan PM Yingluck Shinawatra ke Kamboja itu disambut dengan baik oleh PM Hun Sen. Kunjungan tersebut sebenarnya sudah ditunggu oleh PM Hun Sen. Dalam pertemuan Yingluck dengan PM Hun Sen pada 25 September 2011, kedua kepala pemerintahan bertukar pandangan seputar sengketa perbatasan kedua negara.

PM Yingluck Shinawatra mengatakan pasukan militer tidak perlu lagi ditempatkan di wilayah perbatasan karena akan mengganggu hubungan kedua negara. Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh PM Hun Sen bahwa kedua pasukan militer seharusnya ditarik dari kawasan kuil Preah Vihear dan Hun Sen setuju bahwa tentara di sepanjang perbatasan yang disengketakan mesti bertemu secara rutin untuk menghindari ketegangan. Penarikan pasukan dari area kuil juga perlu dilakukan sebagai perintah dari pengadinal internasional.⁸⁷ Dengan kunjungan PM Yingluck Shinawatra ke Kamboja ini kemudian mencapai hasil yang nyata. Kedua pihak setuju untuk menarik pasukan militernya dari perbatasan. Perjanjian lisan itu dibuat selama pertemuan antara Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra saat berkunjung.

⁸⁷ <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/17/lro56r-yingluck-upayakan-pemulihan-thaikamboja-thaksin-melenggang-di-phnom-penh> diakses pada 20 Desember 2012

Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh menteri pertahanan kedua negara, yakni dari pihak Kamboja Tea Banh dan pihak Thailand Jenderal Yuthasak "Pemindahan ini sangat penting untuk meningkatkan hubungan kedua negara," katanya. Penarikan mundur pasukan militer adalah kesediaan Kamboja dan Thailand," lanjutnya, dan kemudian mengatakan bahwa personil militer akan digantikan oleh polisi. Kedua negara juga diminta mengatur kembali disposisi militer di daerah nonmiliter sementara sekitar Kuil Preah Vihear sehingga ketegangan situasi dapat diredakan. Thailand-Kamboja juga sepakat untuk membentuk sebuah kelompok kerja yang mengawasi pemindahan personel militer mereka seluruhnya dan secara bersamaan dari posisinya di zona demiliterisasi. Aturan penarikan tersebut dilakukan dengan bantuan tim pemantau dari Indonesia.⁸⁸

Kesepakatan tersebut akhirnya bisa direalisasikan oleh kedua negara. Tidak jelas berapa banyak pasukan militer ditarik dari perbatasan, namun hingga Oktober 2011 sebanyak 500 personil lagi (yang merupakan penarikan ke tujuh personel Thailand) dikembalikan ke barak masing-masing. Sebelumnya Penarikan pasukan militer juga dilakukan pada Sabtu 20 Agustus 2011 yang merupakan penarikan kelima. Penarikan pasukan militer ini diperkirakan mencapai sekitar 1.800 tentara dari daerah Chreng Chak.⁸⁹ Penarikan mundur pasukan militer Thailand dilakukan bersamaan dengan militer Kamboja. Upacara mundurnya pasukan dihadiri Jenderal

⁸⁸ Chair's Statement, forum regional ASEAN ke 18 tanggal, 23 July 2011. "Indonesia berkomitmen Penyelesaian Damai Konflik Thailand-Kamboja", press release, president's office, 12 September 2011

⁸⁹ <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/08/20/lq8jz3-kelima-kali-kamboja-tarik-pasukan-dari-perbatasan-dengan-thailand> diakses pada 20 Desember 2012

Kun Kim, wakil Panglima Angkatan Bersenjata Kamboja, dan Jenderal Chea Dara, wakil Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja untuk Wilayah Preah Vihear. Kun Kim menegaskan, bahwa penarikan itu dibuat atas perintah Perdana Menteri Hun Sen melalui kesepakatan bersama dengan PM Yingluck Shinawatra.

3.4 Thailand Izinkan Tim Pemantau (*observer*) ASEAN

Pemerintahan Thailand bersama dengan pemerintahan Kamboja mengatakan kepada mitra ASEAN dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB bahwa pihaknya siap untuk menarik pasukan dari PDZ setiap saat. Penarikan pasukan militer tersebut dilakukan dengan dukungan dari tim pemantau ASEAN.⁹⁰ Dalam hal ini tim pemantau tersebut diwakili oleh ketua ASEAN yakni Indonesia. Tim observer bertugas untuk memantau proses penarikan pasukan yang dilakukan oleh kedua pihak Thailand dan Kamboja.

Tim pemantau tersebut ditempatkan di dua wilayah negara yakni di distrik Sisaket Kantharalak, Thailand dan Distrik Phnom Dong Rak di Provinsi Surin, Kamboja. Namun dalam perjanjiannya tim survey ini tidak memasuki wilayah yang seluas 4,6 km persegi yang berada disekitar kuil Preah dimana tanah yang seluas 4,6 km inilah yang menjadi tanah sengketa. Untuk mendampingi Tim survey ini pihak

⁹⁰ Pernyataan tersebut dibuat oleh Kamboja dalam Rapat ASEAN Foreign Ministers 'dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB ', New York, 27 September 2011. Crisis Group interviews, senior Thai foreign ministry official, Bangkok, 28 September 2011. Perwira militer senior, Bangkok, 3 November 2011. Pengadilan penilaian bersifat final, tanpa banding. Pasal 60, Statuta ICJ. Dalam hal bahwa satu pihak tidak mematuhi keputusan ICG, pihak negara lain dapat membawa hal tersebut kepada Dewan Keamanan. Pasal 94 (2), Piagam PBB

kementerian luar negeri Thailand meminta tim satuan petugas Suranare untuk memfasilitasi kebutuhan tim mereka.

Tim pengamat Indonesia sendiri berjumlah tiga puluh orang. Masing-masingnya dibagi menjadi dua kelompok. Lima belas orang ditempatkan di wilayah Thailand dan lima belas di wilayah Kamboja. Sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan militer yang berpakaian sipil. Sedangkan berdasarkan pada kesepakatan kedua negara, pihak militer digantikan dengan polisi. Semejak tim pemantau ini ditempatkan di wilayah perbatasan suasana menjadi lebih kondusif. Pasukan militer pun tidak lagi bersiaga di wilayah yang disengketakan. Tidak ada baku tembak yang terjadi antara kedua belah pihak. Keadaan begitu tenang. Dibawah pemerintahan Yingluck diharapkan sengketa perbatasan antara Thailand-Kamboja dapat segera diselesaikan. Perdamaian itu terbuka lebar, mengingat Yingluck Shinawatra memiliki hubungan baik dengan Kamboja.

3.5 Pemerintah Thailand-Kamboja Perkuat Kerjasama Ekonomi

Salah satu faktor yang membuat hubungan Thailand dan Kamboja pada masa pemerintahan Abhisit Vejjajiva tidak harmonis disebabkan adanya suatu pandangan PM Abhisit yang melihat bahwa negara tetangganya Kamboja tidak begitu menguntungkan bagi Thailand. Hal ini didasarkan karena Kamboja dianggap sebagai negara yang miskin dan lemah. Pemerintahan Thailand mengabaikan pentingnya kerjasama ekonomi dengan Kamboja.⁹¹ Para petinggi dan pihak militer mengambil langkah keras terhadap Kamboja dengan memutuskan hubungan perdagangan dan

⁹¹ Puangthong Pawakapan, *“From Cooperation to Disintegration; the Roles of State and Uncivil Society in Thailand at the Temple of Preah Vihear”*, ditulis oleh Walter Shorenstein Asia Pacific Research Center, Stanford University, May 2011, chapter 3.

ekonomi. Khawatir nantinya perekonomian Kamboja meningkat tentu akan membuat Kamboja pada posisi yang strategis baik ekonomi maupun militer.⁹² Dibawah pemerintahan PM abhisit Vejjajiva, kerjasama ekonomi Thailand-Kamboja terutama di sektor perdagangan mengalami penurunan tajam.

Akan tetapi berbeda dengan PM Yingluck Shinawatra, Beliau justru melihatnya dari sisi lain. Bisa jadi karena PM Yingluck berasal dari kalangan ekonomi dan bisnis maka ada suatu peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi negaranya yang memang pada saat itu perekonomian Thailand sedang mengalami penurunan. Kebijakan ekonomi Thailand dibawah pimpinan PM Yingluck Shinawatra gencar dilakukan untuk memulihkan perekonomian negaranya. Kerjasama ekonomi dengan Kamboja terus diperluas khususnya pada bidang perdagangan dan investasi.⁹³

Disela-sela KTT ASEAN yang ke-20 di Phnom Penh, Perdana Menteri Hun Sen membahas dengan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra tentang promosi perdagangan antara kedua negara. PM Hun Sen menerangkan bahwa PM Yingluck setuju dengannya bahwa perdagangan bilateral Thailand dengan Kamboja harus lebih ditingkatkan. PM Hun Sen juga telah meminta menteri perdagangan Thailand untuk menindak lanjuti rencana tersebut dengan Menteri Perdagangan Kamboja. Hun Sen juga mengungkapkan "Pertukaran barang-barang dengan satu sama lain lebih menguntungkan dibandingkan pertukaran peluru, 'sambil menyebutkan bahwa

⁹². Crisis Group interview, senior Thai foreign ministry official, Bangkok, 7 June 2011.

⁹³ *Thitinan Pongsudhirak*. Thailand's Security Outlook: Next-Door, Indoor, Non-Traditional and Geo-Regional. chapter 5. 2011, 61

pertukaran tembakan antara tentara kedua negara pada Februari dan April 2011 hanya merugikan kedua belah pihak dengan korban pasukan dan warga sipil.⁹⁴

Lebih lanjut PM Hun Sen mengatakan bahwa Pemerintah Kamboja ingin membangun perbatasan perdamaian, dan kerja sama persahabatan serta pengembangan ekonomi dengan Pemerintah Thailand seperti yang telah dilakukan dengan Vietnam dan Laos. PM Yingluck pun setuju dengan itu karena pada dasarnya kebijakan luar negeri Thailand dibawah pemerintahan PM Yingluck Shinawatra adalah rekonsiliasi perekonomian. Menciptakan perdamaian, memperluas perdagangan serta kerjasama yang baik dengan negara tetangga adalah pilihan kebijakan PM Yingluck Shinawatra.

Seperti diberitakan oleh kantor berita *Agence France Presse* (AFP), Senin 21 Mei 2012, perekonomian Thailand tumbuh 11 persen periode Januari-Maret 2012. Hal ini mengompensasikan kontraksi pertumbuhan ekonomi 10,8 persen periode September-Desember 2012 akibat banjir⁹⁵ yang mengacaukan sektor produksi. Sedangkan untuk perdagangan Thailand- Kamboja meningkat sebesar 21 persen dari tahun sebelumnya. Dengan nilai perdagangan mencapai 3,08 miliar dollar AS.⁹⁶

⁹⁴Josephus Primus.
<http://internasional.kompas.com/read/2012/04/10/16165683/Syarat.Utama.Konflik.Mereda>

⁹⁵ Bencana banjir di Thailand membenamkan 65 dari 77 provinsi selama tiga bulan lebih pada periode Juni 2011 hingga Oktober 2011. Bencana ini banjir ini menjadi yang terburuk di Thailand selama 50 tahun Banjir menyebabkan lebih dari 300 korban tewas. Peristiwa ini dimanfaatkan partai oposisi sebagai alat untuk menuding Pheu Thai, partainya PM Yingluck, bahwa pemerintahan baru Thailand tidak mampu memimpin.

⁹⁶ Nilai perdagangan ini diambil menurut data statistik yang disediakan oleh kedutaan Thailand di Phnom Penh (Kamboja) diakses
<http://internasional.kompas.com/read/2012/04/10/16165683/Syarat.Utama.Konflik.Mereda>

Banyak kalangan menilai bahwa PM Yingluck Shinawatra berhasil membawa negaranya dari keterpurukan ekonomi pasca banjir besar yang melanda di beberapa wilayah Thailand. Begitu juga dengan kerjasama ekonomi Thailand dan Kamboja yang semakin meningkat, dan menunjukkan tanda-tanda positif bagi hubungan kedua negara.

BAB IV

PENGARUH YINGLUCK SHINAWATRA DALAM MERUBAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI THAILAND SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN THAILAND-KAMBOJA

Pada Bab sebelumnya penulis telah memaparkan perubahan kebijakan luar negeri Thailand seiring dengan peralihan kekuasaan perdana menteri Thailand. Hubungan Thailand-Kamboja memanas pada masa pemerintahan Abhisit Vejjajiva. Namun semenjak Yingluck Shinawatra dilantik menjadi perdana menteri Thailand, keadaan sudah kembali membaik. Sudah tidak ada lagi ketegangan diperbatasan setelah pasukan militer Thailand-Kamboja ditarik dari kawasan kuil Preah Vihear. Dengan kepemimpinan Yingluck Shinawatra menjadi babak baru hubungan kedua negara. Hal ini terlihat pada saat kebijakan luar negeri Thailand dalam penyelesaian sengketa perbatasan berubah secara signifikan. PM Yingluck Shinawatra merubah kebijakan luar negeri Thailand dengan menggunakan pendekatan yang baik sebagai upaya penyelesaian sengketa perbatasan.

Peralihan kekuasaan pemerintahan Thailand ini telah mempercepat proses perdamaian dengan Kamboja. Semenjak PM Yingluck Shinawatra menjabat sebagai perdana menteri tidak ada lagi ketegangan antara kedua negara. Namun bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Thailand ini bisa dilakukan oleh PM Yingluck Shinawatra. Maka dalam analisis penulis, ada beberapa faktor PM Yingluck Shinawatra merubah kebijakan tersebut.

4.1 Faktor Psikologis Yingluck Shinawatra

Untuk menjawab pertanyaan didalam penelitian ini maka penulis menganalisisnya melalui pendekatan psikologis Yingluck Shinawatra. Karena pada dasarnya kebijakan yang diterapkan oleh individu sebagai *decision maker* sebagian besar dipengaruhi oleh faktor psikologisnya. Jika dilihat dari faktor psikologis PM Yingluck Shinawatra, maka sangat perlu penulis paparkan sosok dari pemimpin ini.

PM Yingluck Shinawatra lahir pada tanggal 27 juni 1967 di provinsi utara Chiang Mai, Thailand. Yingluck Shinawatra adalah anak bungsu dari sembilan bersaudara. Ayahnya Lert Shinawatra menjabat sebagai anggota Dewan Provinsi Chiang Mai dan kemudian sebagai Anggota Parlemen nasional. Kakaknya Thaksin Shinawatra dua kali menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand (2001-2005, 2005-2006). Yingluck dibesarkan di Chiang Mai dan sekolah di Regina Coeli College, (sebuah sekolah anak perempuan, setara dengan sekolah menengah pertama) dan melanjutkan pendidikan SLTA-nya di Yupparaj College. Beliau lulus dengan gelar BA dari Fakultas Ilmu Politik dan Administrasi Publik, Universitas Chiang Mai pada tahun 1988 dan memperoleh gelar MPA (spesialisasi dalam Sistem Informasi Manajemen) dari Kentucky State University pada tahun 1991.⁹⁷

Selesai studi, Yingluck Shinawatra memulai karirnya sebagai penjualan dan pemasaran di intern Shinawatra Direktori Co, Ltd (sebuah direktori telepon bisnis didirikan oleh AT & T International). Beliau menjadi eksekutif di perusahaan yang

⁹⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Yingluck_Shinawatra diakses pada 22 Januari 2013

didirikan oleh kakaknya, Thaksin Shinawatra. Dan kemudian menjadi presiden properti Aset SC pengembang dan managing director Advanced Info Service. Sementara itu, kakaknya Thaksin Shinawatra menjadi Perdana Menteri yang digulingkan dalam kudeta militer, dan melarikan diri keluar negeri setelah pengadilan menjatuhkan hukuman penjara karena penyalahgunaan kekuasaan.⁹⁸

Pada tahun 1994, Yingluck Shinawatra menjadi manajer umum Rainbow Media (anak perusahaan dari International Broadcasting Corporation yang kemudian menjadi TrueVisions). Beliau melepaskan jabatannya sebagai Deputy CEO IBC pada tahun 2002, dan menjadi CEO dari Advanced Info Service (AIS), operator ponsel terbesar Thailand. Setelah penjualan Shin Corporation (perusahaan induk AIS) kepada Temasek Holdins, Yingluck mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, Namun tetap menjadi direktur manejer SC Asset Co Ltd, untuk pengembangan perusahaan property keluarga Shinawatra. Atas penjualan perusahaan Shin Corp tersebut, *Thailand Securities and Exchange Commission*⁹⁹ menyelidiki mengenai kecurangan transaksi itu.

Yingluck Shinawatra dituduh telah melakukan transaksi palsu. Saham yang dijual dari transaksi tersebut dilakukan dengan dasar nilai nominal untuk menghindari pajak penghasilan dari semua dibayarkan oleh Shin Corp. Namun, AEC tidak menyelidiki secara mendalam tentang kasus terhadapnya. Dalam hal tersebut

⁹⁸ ibid

⁹⁹ *Securities and Exchange Commission* merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk melindungi investor dan memfasilitasi pembentukan modal diamping itu lembaga tersebut mengharuskan semua perusahaan public secara terbuka memberikan informasi keuangan dan yang lainnya untuk kepentingan tertentu.

Yingluck Shinawatra menyatakan bahwa keluarganya telah menjadi korban penganiayaan politik oleh militer.

Yingluck menikah dengan seorang pengusaha, Anusorn Amornchat, dan memiliki satu anak, Supasek Amornchat. Pada Mei 2011, Yingluck Shinawatra menjadi pimpinan partai Pheu Thai, Pada saat itu Yingluck diperkirakan akan menjadi saingan terberat partai pemerintah, yakni Partai demokrat pimpinan Abhisit Vejjajiva untuk pemilihan umum Thailand pada juli 2011. Beliau berkampanye pada rekonsiliasi nasional, pengentasan kemiskinan, dan perusahaan pengurangan pajak penghasilan. Tema utama kampanye Yingluck adalah rekonsiliasi setelah krisis politik yang berkepanjangan mulai 2008 hingga 2010, yang berpuncak pada tindakan keras militer terhadap para demonstran dengan menewaskan hampir seratus pengunjuk rasa dan ribuan lainnya terluka. Beliau berjanji untuk memberdayakan Kebenaran Independen dan Komisi Rekonsiliasi Thailand (ITRC) yang selama itu kinerja ITRC masih terhambat oleh militer dan pemerintah Abhisit.

Selama kampanye perdana menteri, Beliau terus mendapatkan tuduhan dari lawannya PM Abhisit Vejjajiva. Yingluck dituduh akan memberikan amnesty untuk kakaknya Thaksin Shinawatra dan akan mengembalikan harta kakanya yang disita oleh negara. Soal sengketa kawasan kuil Preah Vihear, Yingluck diperkirakan akan sama dengan Thaksin yang dituduh menjual kuil Preah Vihear untuk kepentingan pribadi. Menanggapi tuduhan tersebut, Beliau justru menanggapi dengan bijak. Beliau mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan pernah memberikan amnesty kepada siapapun termasuk kepada kakaknya Thaksin Shinawatra. Tentang sengketa

kawasan kuil Preah Vihear, Yingluck berbalik mengatakan bahwa perang diperbatasan akan dirubah menjadi pasar.¹⁰⁰ Yingluck Shinawatra secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya mempunyai ikatan pribadi dengan Kamboja dan kerjasama Thailand dengan Kamboja harus tetap dipertahankan.¹⁰¹ Pada saat Kampanye di sisaket 29 Juni 2011, Yingluck Shinawatra berjanji kepada warga sekitar perbatasan bahwa hubungan bilateral Thailand-Kamboja akan membaik apabila dirinya terpilih menjadi perdana menteri.

4.1 PM Yingluck Shinawatra Seorang Pemimpin Politik yang Demokrasi (Mempromosikan Ham, Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan, Serta Perjuangan Menentang Rezim Militer)

Satu hal yang perlu diketahui bahwa pemilihan perdana menteri Abhisit Vejjajiva hanya dilakukan melalui pengangkatan di parlemen bukan melalui pemilihan umum yang demokrasi. Pengadilan konstitusi melarang partai koalisi Thaksin Shinawatra terlibat dalam politik sehingga pilihan satu-satunya adalah Abhisit Vejjajiva. Selama berkuasa, pemerintah Abhisit mewakili kaum penguasa oligarki, monarki Thai yang reaksioner, dan militer. Kebijakan ekonomi dan politik PM Abhisit cenderung menguntungkan kelas menengah dan berkuasa termasuk militer. Itu sebabnya kenapa militer mendukung PM Abhisit Vejjajiva menjadi perdana menteri Thailand. Dan hal inilah yang menyebabkan kelompok kaus merah menentang pemerintahan Abhisit Vejjajiva yang cenderung otoriter dengan menggunakan kekuatan militer.

¹⁰⁰ Waging Peace; ASEAN And The Cambodia-Border. Crisis Group Asia Report N 215. 6 December 2011,26

¹⁰¹ Pernyataan ini penulis kutip pada saat Yingluck Shinawatra berkampanye di wilayah sisaket pada 29 juni 2011, Thailand (wilayah perbatasan Thailand-Kamboja/wilayah kuil preah vihear.

Pihak militer terus berada dibalik kepemimpinan PM Abhisit Vejjajiva semua kebijakan ekonomi dan politiknya cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan khususnya militer. Ini juga yang menjadi alasan utama militer mengudeta perdana menteri yang populis.¹⁰² Selama PM Abhisit Vejjajiva berkuasa, kehidupan kelas bawah di Thailand semakin tidak menentu. Para buruh dan petani semakin tertindas lewat kebijakan ekonominya yang tidak prorakyat. Himpitan ekonomi dan pemerintahan yang otoriter menjadi faktor utama munculnya gerakan kaus merah. Hal tersebut menunjukkan mengapa massa telah menunjukkan begitu besar kebulatan tekad dan keteguhan untuk berjuang mencari keadilan dan kesetaraan Thailand. Kaum intelektual kelas bawah menghendaki demokrasi yang lebih luas dan ingin mengurangi pengaruh militer di dalam politik.

Ini adalah sebuah perjuangan antara kaum kaya dan miskin. Kelompok kaos-merah digambarkan sebuah gerakan "pro-demokrasi". Ada sebuah keinginan dari rakyat untuk menciptakan terwujudnya sistem demokrasi. Sementara itu sistem demokrasi digambarkan dengan keadilan politik dan keadilan sosial tanpa adanya pengaruh militer. Kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi kedua hal tersebut tak terpisahkan. Dan itu hanya bisa didapatkan melalui perubahan struktur politik terutama pada perubahan kepala pemerintah. Sedangkan militer cenderung bersifat represif.

¹⁰² Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan militer mengudeta Thaksin Shinawatra adalah karena kebijakan ekonomi Thaksin yang populis. Thaksin lebih memihak untuk kepentingan rakyat miskin dan petani perdesaan sehingga pihak militer dalam posisi yang dirugikan.

Yingluck Shinawatra menjadi aktor satu-satunya pilihan rakyat sekaligus sebagai sosok yang paling berpengaruh. Kalangan kelas bawah mulai menemukan seorang pemimpin politik yang dapat memperjuang kepentingannya. Kebijakan ekonomi PM Yingluck Shinawatra dapat dikatakan sebagai bagian dari perjuangan untuk kepentingan rakyatnya. Ini terlihat pada saat kampanye, PM Yingluck berjanji untuk memberikan jaminan harga bagi petani, meningkatkan upah minimum, mempertahankan kebijakan untuk mendorong investasi asing dan mengambil langkah-langkah untuk menekan harga.¹⁰³

Yingluckpun juga memberikan tumpuan terhadap usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan mengurangi pengangguran khususnya untuk masyarakat miskin. Pemberantasan kemiskinan dan pengurangan pajak penghasilan juga merupakan kebijakannya. Yingluck Shinawatra menggambarkan visi 2020 untuk penghapusan kemiskinan. Beliau berjanji untuk mengurangi pajak penghasilan dari 30% menjadi 23% dan kemudian 20% pada tahun 2013 dan untuk menaikkan upah minimum 300 baht per hari dan upah minimum untuk para sarjana menjadi 15.000 baht per bulan.¹⁰⁴

Kebijakan ekonomi PM Yingluck Shinawatra dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan merata. Bagi kalangan buruh dan tani, PM Yingluck Shinawatra merupakan pemimpin yang kharismatik. Beliau memperjuangkan kepentingan rakyat yang selama ini terabaikan pada kepemimpinan

¹⁰³ <http://www.suarapembaruan.com/home/yingluck-janjikan-rekonsiliasi-di-thailand/864>
diakses pada 20 Desember 2012

¹⁰⁴ <http://wikipedia.org>. diakses pada 20 Desember 2012

PM Abhisit Vejjajiva. Beliau disebut sebagai pemimpin yang demokrasi karena dapat membendung pengaruh militer yang terus melakukan tindakan represif terhadap rakyat kecil. Biasanya jika suatu negara terdapat kekuatan militer yang cukup besar maka sistem otoriter akan berlaku dan demokrasi dinegara tersebut akan mengalami kemunduran. PM Yingluck Shinawatra selalu berusaha meyakinkan kepada rakyat bahwa dirinya adalah pemimpin demokrasi bebas dari pengaruh militer. Selama ini Yingluck Shinawatra terus berupaya membendung dominasi militer untuk ikut terlibat didalam kebijakan politik Thailand.

Dalam pandangan Beliau mengenai Demokrasi, Seperti yang penulis kutip diberberapa bagian pernyataan PM Yingluck Shinawatra; Dalam forum demokrasi di Bali.¹⁰⁵

“Jika sebuah pemerintahan demokratis adalah untuk kebenaran seperti perkataan Abraham Lincoln dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka hak-hak semua warga negara harus dipromosikan dan dilindungi oleh pemerintah. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kebebasan sering disalahgunakan dan ditekan. Thailand telah mengalami banyak coup d'États melawan kehendak rakyat. Jadi sekali pemerintah naik dengan cara-cara demokratis, maka harus dibuat berkelanjutan. Cara terbaik untuk melestarikan demokrasi adalah

¹⁰⁵ <http://www.thaigov.go.th/en/speech-a-press-release/item/73082-statement-by-her-excellency-ms-yingluck-shinawatra-prime-minister-of-the-kingdom-of-thailand-at-the-fifth-bali-democracy-forum-bali-indonesia-8-november-2012.ht> diakses 18 Juni 2013

memberdayakan masyarakat untuk nilai dan berpartisipasi dalam proses demokrasi yang telah memungkinkan untuk pemilihan terjadi. Ketika orang berpartisipasi mereka merasa bahwa mereka memiliki demokrasi dan menghargai nilai-nilai.

“Dan ketika demokrasi ditumbangkan atau dilecehkan, orang akan bangkit membela. Inilah yang terjadi di Thailand pada tahun 2010. Keluarga kehilangan orang yang mereka cintai, dan ada penderitaan. Saya sedih dan saya bertekad untuk memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Itulah sebabnya kita mengejar rekonsiliasi nasional dan tegas mengikuti kerangka hak asasi manusia. Saya akan terus mengejar ini sampai demokrasi sejati diwujudkan di Thailand. Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa demokrasi bertahan ketika terancam. Untuk alasan ini, kami menghargai banyak sikap teman-teman kita terhadap penggulingan pemerintahan yang demokratis Thailand pada tahun 2006 dan membantu mendukung kami dalam jalan kita menuju demokrasi sejati. Yang Mulia, Hadirin yang saya muliakan, Hanya melalui demokrasi stabilitas dapat dicapai. Stabilitas politik membantu mengurangi risiko konflik kekerasan. Hanya dalam suasana seperti dapat kemajuan ekonomi terus terjadi. Intinya adalah kesejahteraan semua warga negara, di negara-negara kita dan dalam komunitas global.”

Pernyataan tersebut telah menunjukkan bahwa PM Yingluck Shinawatra ingin menegakan sistem demokrasi di Thailand. Belajar dari pengalaman perpolitikan Thailand yang suram rentan dengan intervensi militer dan menyebabkan kekisruhan memberikan paradigma Yingluck Shinawatra betapa pentingnya demokrasi di Thailand. Beliau meminta dukungan internasional agar Thailand menjadi negara yang demokrasi. Beliau berjuang menciptakan dan melindungi hak-hak rakyat. Sejarah mencatat tahun 2006 terjadi kudeta militer dan 2010 bentrokan antara militer dengan sipil yang mengakibatkan lebih kurang seratus korban tewas menunjukkan bahwa telah terjadi kemunduran demokrasi, dan PM Yingluck menjamin tidak akan terjadi lagi peristiwa itu. Maka dalam hal ini kita bisa melihat bahwa PM Yingluck Shinawatra terus berjuang menciptakan demokrasi di Thailand.

Sehubungan dengan kebijakan ekonomi dan politik PM Yingluck Shinawatra Beliau telah banyak melakukan perubahan kebijakan ekonomi yang strategis.¹⁰⁶

1. Bidang Anak dan Kesejahteraan Wanita

Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak adalah salah satu prioritas utama pemerintahnya. Program ini menyediakan dana 100 juta baht (US \$ 3,3 juta) untuk 77 provinsi dengan tujuan mendukung partisipasi perempuan dalam proses pembangunan nasional, menjamin perlindungan hak-hak perempuan, penyempurnaan hukum dalam menangani kekerasan domestik, dan meningkatkan aksesibilitas perempuan terhadap pendidikan, dana, dan kesehatan. Bahkan, PBB

¹⁰⁶ <http://www.thaigov.go.th/en/the-prime-minister.html> diakses 18 Juni 2012

telah membuka kantor di Thailand untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak-anak miskin di Asia. Dalam ASEAN, Yingluck secara aktif mempromosikan pembangunan kesejahteraan perempuan, sebagai kelompok yang mempersiapkan untuk Komunitas ASEAN 2015. Selama kunjungan resminya ke negara-negara asing, Beliau mempromosikan hak-hak perempuan dan anak-anak, baik melalui pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di beberapa negara seperti Davos dan Universitas Ewha Woman di Republik Korea.

2. Bidang Kesehatan

Memastikan akses ke pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi semua adalah prioritas penting bagi PM Yingluck Shinawatra. Pemerintahnya menyediakan dana 30 baht (US \$ 1) untuk Program kesehatan universal, sebuah inisiatif dimulai oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Yingluck bekerja untuk menyelaraskan sistem kesehatan, yang saat ini terdiri dari beberapa skema cakupan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesetaraan dalam cakupan pelayanan kesehatan untuk semua pasien. Selain itu, program baru ini telah diperluas untuk mencakup penyakit ginjal dan AIDS. Program ini peringkat sebagai kebijakan pemerintah yang paling sukses.

3. Pendidikan

Untuk mempromosikan akses yang lebih universal untuk pendidikan berkualitas bagi anak-anak sekolah, Perdana Menteri Yingluck meluncurkan kebijakan Tablet Satu Per Anak di 2012. Tahap uji coba proyek ini dimulai pada

tahun ajaran 2012 dan dilengkapi dengan pengembangan dan instalasi konten pendidikan dan perluasan cakupan internet nirkabel gratis untuk sekolah.

4. Urusan Internasional

PM Yingluck Shinawatra adalah salah satu perdana menteri Thailand yang cenderung terbuka terhadap negara lain. Beliau telah memainkan peran aktif di panggung internasional sejak menjabat. Beliau terus meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga dan memajukan Komunitas ASEAN, untuk mengkonsolidasikan kemitraan strategis dengan mitra utama Thailand dan mempromosikan kerjasama yang lebih erat dalam isu-isu global dalam forum-forum multilateral. Selama tahun pertama pemerintahannya, Yingluck telah mengunjungi delapan belas negara dan berpartisipasi dalam enam KTT regional dan multilateral, serta Forum Ekonomi Dunia di Swiss. Beliau juga telah menerima berbagai kunjungan oleh para pemimpin asing untuk Thailand.

Organisasi-organisasi internasional dan entitas telah memuji pekerjaannya dan inisiatif kebijakan sebagai wanita pertama menjadi perdana menteri Thailand. Majalah Forbes menjadikan Yingluck Shinawatra peringkat ke-30 di dunia wanita paling berpengaruh 2012. Dengan mengakui kebijakannya seperti meningkatkan upah minimum harian, penyesuaian gaji bagi pemegang gelar sarjana dan komitmennya untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional.

5. Rekonsiliasi Politik

Mempromosikan rekonsiliasi politik tetap menjadi salah satu tujuan prioritas utama pemerintah karena merupakan harapan besar dalam mencapainya di Thailand semenjak terjadinya kekacauan politik. Melalui pelaksanaan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Thailand (TRCT), kepatuhan terhadap aturan hukum, dengan pendekatan berpikiran terbuka, pemerintah telah berhasil mengubah konflik politik menuju musyawarah dan demokrasi dan dengan cara yang konstruktif dalam kerangka konstitusi.

4.2 Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Mampu Mengontrol Kekuatan Militer

Sengketa kawasan kuil Preah Vihear bermula ketika terjadinya krisis politik Thailand pada tahun 2006. Krisis politik tersebut disebabkan dikudetanya PM Thaksin Shinawatra oleh militer Thailand. Associated Press menyebut, militer Thailand melakukan tak kurang dari 18 kudeta terhadap pemerintah berkuasa sejak tahun 1930-an. Terakhir kali, militer mengudeta¹⁰⁷ pemerintahan Perdana Menteri

¹⁰⁷ Kudeta militer terjadi saat PM Thaksin Shinawatra berada di USA untuk mengikuti sidang majelis umum PBB. Kudeta tersebut dilancarkan oleh anggota angkatan darat terhadap pemerintahan PM Thaksin Shinawatra. Tanggal 19 September 2006 pasukan khusus angkatan darat Thailand pimpinan Shonti bergerak dari Lopburi menuju Bangkok. Shonti mengambil alih pemerintahan dan mendaulat sebagai perdana menteri menggantikan Thaksin Shinawatra.

Thaksin Shinawatra pada 20 September 2006.¹⁰⁸ Semenjak dikudetanya PM Thaksin Shinawatra, kelompok kaus merah¹⁰⁹ gencar melakukan demonstrasi.

Puncak terjadinya unjuk rasa pada saat pemerintahan Abhisit Vejjajiva berkuasa. Aksi unjuk rasa ini sempat melumpuhkan kota Bangkok. Peristiwa tersebut memicu kontak senjata dengan aparat kepolisian dan militer Thailand. Itu sebabnya, ketika pihak militer bentrok dengan massa, Bangkok berubah menjadi ajang perang kota yang menakutkan. Tank, bazoka, dan rentetan tembakan senapan mengarah pada kumpulan massa. Selama masa kelompok merah melakukan demonstrasi dilaporkan sekitar 91 orang dinyatakan tewas dan 850 orang terluka akibat bentrokan dengan aparat militer.¹¹⁰

Sementara itu, untuk meredam gejolak politik yang terjadi di Thailand, perang diperbatasan Thailand-Kamboja adalah kebijakan yang dilakukan oleh Abhisit Vejjajiva. Isu kuil Preah Vihear kemudian dipolitisir. PM Abhisit menekan isu kuil Preah Vihear ini untuk melemahkan popularitas Thaksin Shinawatra. Komitmen Thaksin yang mendukung upaya Kamboja agar kuil Preah Vihear terdaftar kedalam situs warisan dunia UNESCO dimanfaatkan oleh Abhisit untuk memulihkan situasi

¹⁰⁸ Sri Issundari. Latar Belakang kudeta militer Thailand pada masa PM Yingluck Shinawatra. (Jurusan ilmu hubungan internasional; Universitas Veteran). Yogyakarta. 2008, 203

¹⁰⁹ Kelompok kaus merah adalah kelompok pendukung Thaksin Shinawatra. Kelompok ini berasal dari kalangan bawah dan mayoritas berasal dari wilayah perdesaan. Thaksin Shinawatra yang gencar melakukan kebijakan ekonomi populis demi kepentingan rakyat bawah.

¹¹⁰ Sartika Soesilowati, M.A, PhD. *Dampak Kerusuhan Politik Thailand terhadap ASEAN*. (Center for Strategic and Global Studies Briefing /CSGS; Departemen hubungan internasional universitas Airlangga.Surabaya). 2010, 2

yang tengah konflik ini.¹¹¹ Menurut penuturan Nelson Rand,¹¹² bahwa ketegangan meningkat di antara kedua pada November 2009 ketika Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen menunjuk mantan Perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra sebagai penasihat ekonomi Kamboja.¹¹³

Apa yang mulanya sebagai sengketa perbatasan itu kemudian digunakan sebagai satu set tujuan politik oleh pemerintah Abhisit Vejjajiva sebagai kesempatan menarik sentimen nasionalis dan dukungan rakyat mereka terhadap ancaman eksternal. Pendapat dari Nelson Rand dibenarkan oleh Bower. Bower memaparkan bahwa dalam konteks konflik perbatasan kuil Preah Vihear, Pemerintah Thailand sebenarnya sedang berupaya menarik simpati rakyat. Tujuannya adalah memperkokoh kekuasaan. Apalagi, pada saat itu Thailand akan mengadakan pemilihan umum perdana menteri.

Situasi itu diperkuat oleh hubungan pemerintah dan rakyat yang tidak kunjung membaik pasca kerusuhan politik. "Konflik di perbatasan itu memang sengaja dibuat dan direayasa, 'terangnya. Pemerintahan PM Abhisit Vejjajiva sengaja memanfaatkan isu perbatasan untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Thailand. Sebab saat itu rakyat masih terpisah menjadi pendukung kelompok Kaus Merah (pro-

¹¹¹ Pavin Chachavalpongpun. *The Dispute Thai Cambodia Border*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore. 2011, 2

¹¹² Nelson Rand adalah seorang jurnalis Kanada yang telah lama menetap di Bangkok dan menulis tentang pemberontakan maupun protes politik di Thailand. Beliau lulusan master s of art pada Program kebijakan ASIA Pacifik.

¹¹³ <http://indopos.co.id/index.php/arsip-berita-internasional/39-internasional-news/11637-sengketa-thailand-kamboja-kembali-pecah-bagaimana-analis-melihatnya.html> diakses pada 8 oktober 2012

Thaksin) dan Kaus Kuning (pro-Abhisit). Dengan menghidupkan isu nasionalisme, Abhisit berharap dapat kembali mempersatukan rakyat Thailand. Paling tidak bisa memaksa rakyat sejenak melupakan konflik di dalam negeri yang merenggut nyawa puluhan orang tersebut. Selain itu, faktor militer menjadi pertimbangan penting bagi Abhisit. Lebih-lebih, menjelang pemilu pada 3 Juli 2011, Abhisit tentunya butuh dukungan dari pihak militer.

Sedangkan analisis lain, Pavin Chachapongpun (pengamat politik) berpendapat sengketa kawasan kuil Preah Vihear sebagai taktik militer Thailand. Pakar ilmu politik pada Institute of Southeast Asian Studies di Singapura ini mengatakan bahwa militer Thailand berusaha mengulur pemilu lewat konflik perbatasan. Sebab, Pihak militer tidak yakin pada kemampuan pemerintahan Abhisit Vejjajiva untuk memenangkan pemilu. Militer Thailand, yang menyingkirkan Thaksin melalui kudeta damai pada 2006 lalu, khawatir bahwa partai oposisi pimpinan Yingluck Shinawatra akan menang dalam pemilu nanti. Jika Abhisit Vejjajiva kalah dalam pemilu nantinya maka kekuasaan militer pasti tidak akan sebesar ini.¹¹⁴

Pavin juga berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran politik di Thailand dimana adanya unsur campur tangan militer terhadap pemerintah dan politik Thailand. Buktinya isu kuil Preah Vihear ini tentunya memberikan kesempatan bagi militer Thailand untuk mengambil kontrol penuh terhadap kebijakan luar negeri Thailand

¹¹⁴Pavin Chachavalpongpun. *The Dispute Thai Cambodia Border*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore. 2011, 2

karena hal ini menjamin peran politik serta kewenangan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Bentrokan juga terjadi pada saat yang tepat ketika ketidakstabilan politik didalam negeri Thailand, dan bahkan perang di sepanjang perbatasan akan membenarkan permintaan militer menguasai penuh pemerintahan. Dalam pandangannya, disaat konflik perbatasan terjadi, negara membutuhkan pemimpin yang kuat, Maka dengan demikian Pemerintahan Abhisit dengan dukungan pihak militer merupakan pilihan yang tepat sebagai pemimpin untuk menjaga kedaulatan negara Thailand.¹¹⁵

Para petinggi militer Thailand sepertinya berusaha untuk menciptakan kekisruhan keamanan jadi, militer bisa mengulur penyelenggaraan pemilu. Analisis Pavin itu juga dibenarkan Duncan McCargo, pakar Asia Tenggara pada University of Leeds, Inggris. Menurutnya, konflik perbatasan tersebut murni rekayasa militer Thailand. Konflik di perbatasan itu menjadi ajang pamer militer untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa hanya militerlah yang bisa mewujudkan keamanan nasional, Dengan begitu, simpati rakyat kepada militer pun akan muncul. Sebaliknya, kekuatan oposisi yang tak didukung militer akan bisa disingkirkan.

Dari situasi ini militer jelas berusaha untuk menunda pemilu, dan salah satu strategi adalah menciptakan kondisi tidak aman di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja. Hal ini menandakan bahwa perang diperbatasan merupakan masalah yang sangat serius dan terus mengancam kedaulatan Thailand. Di bawah keadaan tak menentu tersebut, militer sangat percaya bahwa pemilihan umum terlalu dini

¹¹⁵ *Ibid*

dilakukan karena bisa membawa lebih banyak ketidakpastian. Dalam perpolitikan, militer tentunya ingin tetap eksis. Sepanjang gejolak politik Thailand, Thaksin Shinawatra dan pendukungnya kelompok kaus merah telah dianggap sebagai pro-Kamboja.

Pandangan tersebut semakin diperkuat ketika perdana Menteri Abhisit Vejjajiva baru saja mengumumkan bahwa pemilihan umum perdana menteri akan diselenggarakan pada 3 juli 2011 sedangkan bentrokan kedua militer Thailand-Kamboja terjadi hanya kurang dari dua bulan sebelum pemilihan berlangsung. Sebelum pengumuman tanggal pemilihan umum perdana menteri Thailand kemudian dengan kesengajaan militer Thailand yang menyusup masuk kewilayah kuil Preah Vihear sehingga memancing perang diperbatasan dengan militer Kamboja. Ditambah lagi dengan tema kampanye Abhisit Vejjajiva yang terus menyudutkan partai oposisi (Partai Pheu Thai pimpinan Yingluck Shinawatra)

Hal ini semakin terlihat pada saat kampanye pemilu perdana menteri Thailand PM Abhisit Vejjajiva gencar melakukan tuduhan terhadap Yingluck Shinawatra. PM Abhisit menuduh Yingluck Shinawatra adalah dalang dibalik krisis politik Thailand. Abhisit mengatakan bahwa Yingluck adalah aktor yang membiayai pengunjuk rasa kaus merah selama demonstrasi tahun 2010. Abhisit mengungkapkan Kaos Merah berusaha menggulingkan pemerintahan monarki. Pandangan tersebut diperkuat pada saat Departemen khusus Investigasi menemukan bahwa dari tanggal 28 April 2009 hingga Mei 2010, sebanyak 150 juta baht ditahan ke salah satu rekening Yingluck

sementara 166 juta baht ditarik. Pada tanggal 28 April 2010 saja, 144 juta baht ditarik dari rekening Yingluck Shinawatra.

Partai Demokrat mengklaim bahwa Yingluck bertindak dalam kepentingan kakaknya.¹¹⁶ Tema kampanye Abhisit Vejjajiva berlanjut ke persoalan sengketa kuil Preah Vihear. Bagi partai oposisi, terutama Yingluck Shinawatra isu kuil Preah Vihear menjadi begitu sensitif. Dalam hubungannya Yingluck dikaitkan dengan kakaknya Thaksin Shinawatra yang mendukung langkah Kamboja untuk pemberian status kuil Preah Vihear menjadi situs warisan dunia UNESCO. Isu kuil Preah Vihear menjadi isu utama bagi Abhisit untuk melemahkan popularitas Yingluck Shinawatra.

Akan tetapi, semenjak Yingluck menjadi perdana menteri Thailand, kekuatan militer tidak lagi sebesar pada saat Abhisit Vejjaiwa berkuasa. PM Yingluck Shinawatra mampu membendung kekuatan militer yang memang pihak militer selama ini terus berupaya aktif dalam konfrontasi perbatasan dan menghalangi upaya penyelesaian sengketa perbatasan dengan Kamboja. Dalam kunjungannya di Phnom Pehn Kamboja, Sehubungan dengan masalah penyelesaian konflik perbatasan, Beliau secara tegas mengatakan bahwa pemerintahannya dapat mengontrol militer Thailand. Pernyataan ini diperkuat dengan upaya PM Yingluck dengan mengganti aktor

¹¹⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Yingluck_Shinawatra diakses pada 22 Januari 2013

Thailand yang sebagian besar terlibat dalam skenario yang dilakukan oleh mantan PM Abhisit Vejjajiva.¹¹⁷

Kebijakan yang diterapkan PM Yingluck Shinawatra dapat dikatakan sebagai langkah yang baik dalam penyelesaian sengketa perbatasan kuil Preah Vihear. Diizinkan Tim pemantau serta bersedia menerima keikutsertaan ASEAN merupakan karakter yang menggambarkan bahwa Yingluck Shinawatra adalah pemimpin yang demokratis. Disamping itu faktor yang juga ikut menentukan kuatnya pengaruh Yingluck Shinawatra adalah ketika pihak militer Thailand menerima hasil pemilu perdana menteri yang dimenangkan oleh Yingluck Shinawatra.

Faktor ini sangat penting untuk mendukung kebijakan PM Yingluck Shinawatra. Sebab pihak militer Thailand tidak lagi menghalangi upaya pemerintahan PM Yingluck Shinawatra dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. Pernyataan PM Yingluck Shinawatra bahwa pemerintahannya dapat mengontrol pihak militer tersebut kemudian dipertegas dengan pernyataan Menteri Pertahanan Thailand Jenderal Prawit Wongsuwon. Seperti yang dikatakan, Jenderal Prawit Wongsuwon bahwa pihak militer menerima pemerintahan yang dipimpin oleh Yingluck Shinawatra dan bersumpah tidak akan ada kudeta oleh militer terhadap pemerintahan Yingluck Shinawatra.¹¹⁸

¹¹⁷ *Waging Peace; ASEAN And The Cambodia-Border*. Crisis Group Asia Report N 215. 6 December 2011, 32

¹¹⁸ *Gen Prawit: Army accepts election*". *Bangkok Post*. AFP. 4 July 2011.

Militer akan membiarkan para politisi menuntaskan ini semua. Pihak militer tidak akan mencampuri urusan politik negaranya lagi, begitu kata Wongsuwon, yang juga purnawirawan jenderal angkatan darat Thailand di Bangkok.¹¹⁹ Dengan demikian setelah lengsernya pemerintahan Abhisit Vejjiva, militer Thailand tidak lagi intervensi kebijakan politik negaranya. Peralihan kekuasaan ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Thailand sudah beralih menjadi sistem yang demokrasi.

4.3. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Membentuk Kabinet Thailand

Sebulan setelah dilantiknya menjadi perdana menteri oleh raja Thailand, Yingluck Shinawatra segera membentuk kabinet barunya. Pergantian kabinet ini dilakukan Yingluck Shinawatra untuk memuluskan niatnya membangun kembali hubungan baik dengan Kamboja pascaperang diperbatasan. Pada dasarnya PM Yingluck Shinawatra mengganti semua menteri pada masa pemerintahan Abhisit Vejjiva, namun yang bersentuhan langsung dalam kasus sengketa perbatasan ini adalah pada menteri luar negeri dan menteri pertahanan Thailand serta aktor-aktor yang terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa yang memang selama ini aktor-aktor tersebut menjadi faktor penghambat proses perdamaian Thailand-Kamboja.

Dalam jajaran kabinet barunya, Perdana menteri Yingluck Shinawatra telah mengganti Menteri luar negeri Kasit Piromya dengan Surapong Tochakchaikul. Kasit Piromya sebagai menlu kepercayaan Abhisit untuk urusan luar negeri Thailand ini

¹¹⁹ <http://www.globaltimes.cn/content/664588.shtml> diakses pada 22 Januari 2013

dikenal dengan sikap anti Kamboja. Kasit Piromya dinilai sebagai menteri yang tidak konsisten oleh pihak ASEAN maupun Kamboja. Dalam kaitan ini, Menlu Surapong telah mengambil langkah-langkah melicinkan proses kesepakatan penyelesaian sengketa kuil Preah Vihear. Duta Besar Asda Jayanama, mantan Wakil Tetap Thailand di New York yang menjadi Ketua Delegasi Thailand dalam *the Thai-Cambodian Joint Commission on Land Demarcation*¹²⁰, telah diganti oleh Bundit Sottiplarit. Dubes Virachai Plasai, mantan Dubes Thailand di Belanda, telah diberhentikan sebagai penasihat *the Thai-Cambodian Joint Boundary Commission*¹²¹.

Tidak hanya itu, Yingluck juga mengganti Menteri Pertahanan Thailand Prawit Wongsuwon dengan Jenderal Yuthasak Patimapakorn. Seperti yang diketahui bahwa jenderal Prawit Wongsuwon merupakan aktor dibalik penolakan terhadap mediasi ASEAN. Mantan menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwon ini secara tegas menolak JBC (*Joint Border Commite*) diadakan di Jakarta serta melarang tim *observer* dari ASEAN untuk ditempatkan di wilayah perbatasan. Sekarang Prawit Wongsuwon diganti oleh Jenderal Yuthasak Patimapakorn sebagai Menteri Pertahanan Thailand. Sehubungan dengan pergantian menteri Pertahanan Thailand, Jenderal Yuthasak mengambil sikap proaktif dalam menciptakan pedamaian dengan Kamboja.

¹²⁰ *The Thai-Cambodian Joint Commission on Land Demarcation* fokus utama adalah pada masalah-masalah teknis yang terkait dengan demarkasi untuk batas tanah dari perbatasan Thailand-Kamboja. Topik yang dibahas meliputi persiapan untuk survey lapangan dan Spesifikasi teknis untuk produksi peta ortofoto

¹²¹ *Thai-Cambodian Joint Boundary Commission* merupakan suatu komisi perwakilan dari Thailand-Kamboja yang hendak mengadakan pertemuan untuk membahas masalah perbatasan kedua negara.

Sikap Jenderal Yuthasak terlihat ketika Yingluck Shinawatra memintanya untuk melakukan pertemuan dengan menteri pertahanan Kamboja. Upaya pertemuan tersebut akhirnya bisa direalisasikan. Kedua menteri pertahanan Thailand dan Kamboja bertemu membahas serangkaian kegiatan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa perbatasan. Pertemuan RBC dan GBJ bukti kesediaanya untuk mewujudkan perdamaian kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut telah terdapat berbagai kesepakatan yang mengarah pada hasil yang baik. Penarikan pasukan Thailand dan Kamboja hasil dari pertemuan itu. Maka dengan aktor-aktor baru Thailand ini mampu menciptakan situasi kondusif mengarah pada kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Dari point ini penulis menyadari bahwa perubahan kebijakan luar negeri suatu negara bersumber dari perubahan pada struktur pemerintah khususnya perubahan pada kepala pemerintah. Namun dukungan dari berbagai pihak juga tidak kalah pentingnya untuk mendukung adanya perubahan kebijakan luar negeri Thailand.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Sengketa Kuil Preah Vihear memang menjadi masalah laten bagi hubungan bilateral Thailand-Kamboja. Konflik ini terus berlangsung dan menjadi tradisi turun temurun oleh kepala pemerintahan Thailand. Sengketa kuil Preah Vihear dimulai dari zaman kolonial Perancis di Kamboja hingga Kamboja mencapai kemerdekaan pada tahun 1953. Berberapa faktor menjadi latar belakang munculnya konflik ini, perbedaan peta yang dimiliki kedua negara, faktor sejarah, serta konflik ekonomi ikut mempengaruhi ketegangan. Namun faktanya, kepala pemerintah adalah paling utama sebagai aktor yang mempengaruhi munculnya konflik tersebut. Pergantian kepala pemerintah Thailand dapat menentukan apakah konflik bisa diredam atau bahkan diperluas.

Hubungan Thailand-Kamboja sangat baik pada era Thaksin Shinawatra. Mantan perdana menteri Thailand ini mampu memisahkan perselisihan perbatasan kedua negara melalui serangkaian kerjasama di berbagai sektor. Akan tetapi hubungan Thailand-Kamboja menjadi memburuk di era pemerintahan Abhisit Vejjajiva. Sejarah mencatat bahwa sengketa perbatasan Thailand Kamboja mencapai titik klimaknya pada masa pemerintahan Abhisit Vejjajiva. Peristiwa ini menjadi yang terparah dalam konflik yang pernah terjadi sebelumnya. Tercatat pada tahun 2008-2011 (masa pemerintahan Abhisit Vejjajiva) perang diperbatasan terjadi lebih dari tujuh kali ditambah dengan perang dalam skala kecil. Hal ini disebabkan karena pasukan militer kedua negara disiagakan diperbatasan. Sedangkan bentrokan terburuk

terjadi pada Februari hingga April 2011 dengan korban tewas mencapai 23 orang termasuk warga sipil.

Sebenarnya ada satu hal yang menjadi pemicu perang diperbatasan Thailand-Kamboja. Dan hal itu tidak lain disebabkan karena krisis politik yang terjadi di dalam negeri Thailand. Gejolak politik yang dimulai dengan demonstrasi masa pendukung kaus merah yang menginginkan PM Abhisit untuk mundur dari jabatannya kemudian diakhiri dengan peristiwa penembakan oleh aparat militer Thailand menjadi alasan kuat mengapa perang diperbatasan harus dilakukan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pendukung kaus merah tidak menerima kudeta Thaksin Shinawatra oleh militer. Kelompok kaus merah menentang pemerintahan dan menganggap bahwa PM Abhisit tidak sah sebagai perdana menteri. Masa menginginkan pemilihan umum perdana menteri kembali dilakukan.

Dukungan Thaksin Shinawatra terhadap upaya Kamboja dalam pemberian status warisan dunia oleh UNESCO untuk kuil Preah Vihear kemudian dimanfaatkan Abhisit untuk melemahkan popularitas Thaksin Shinawatra. Itu kenapa perang meluas semenjak UNESCO menetapkan kuil Preah Vihear menjadi situs warisan dunia pada Juli 2008 sampai 2011. Sengketa perbatasan sengaja dimanfaatkan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme rakyat Thailand sebab masa masih terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok kaus merah pendukung Thaksin Shinawatra kemudian kelompok Kaus kuning pendukung PM Abhisit Vejjajiva. Dengan adanya perang diperbatasan maka akan muncul rasa kebangsaan sebagai harapan bahwa persatuan rakyat adalah yang utama untuk mencegah ancaman eksternal.

Sengketa perbatasan jelas merupakan strategi PM Abhisit Vejjajiva untuk menarik sentiment rakyat. Isu kuil Preah Vihear telah dipolitisir untuk mencapai satu set tujuan politiknya. Ketika jelas bahwa isu kebijakan luar negeri digunakan sebagai *struggle of power*/ perjuangan untuk mencapai kekuasaan. Sementara pihak militer terus mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Abhisit Vejjajiva. Kepentingan material corp menjadi alasan mengapa militer mendukung pemerintahan Abhisit Vejjajiva. Pihak militer juga sangat aktif dalam mengkonfrontasi konflik perbatasan tersebut.

Kebijakan luar negeri Thailand berubah drastis setelah PM Abhisit Vejjajiva lengser dari kursi perdana menteri. PM Abhisit kemudian digantikan oleh Yingluck Shinawatra. Peralihan kekuasaan oleh PM Yingluck Shinawatra menjadi babak baru hubungan bilateral kedua negara. Dibawah pemerintahan PM Yingluck Shinawatra hubungan Thailand-Kamboja kian harmonis. PM Yingluck Shinawatra berhasil menyelesaikan ketegangan kedua negara melalui serangkaian upaya penyelesaian sengketa. PM Yingluck juga telah melakukan perubahan terhadap kebijakan luar negeri Thailand.

Penyelesaian sengketa perbatasan dilakukan dengan cara yang lebih baik. Di era pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, Thailand bersedia menerima keterlibatan ASEAN serta mengizinkan tim observer Indonesia ditempatkan di wilayah perbatasan. Penarikan pasukan militer pun juga merupakan kebijakan luar negeri Thailand. Sekarang tidak ada lagi perang diperbatasan semenjak kedua pasukan militer ditarik dari perbatasan.

Sedangkan untuk melancarkan upaya damainya, Beliau telah mengganti sejumlah aktor yang selama ini menjadi faktor penghambat dalam upaya penyelesaian sengketa. Sebagaimana yang dipaparkan bahwa Menteri Pertahanan Jenderal Prawit Wongsuwon telah diganti oleh Jenderal Yuthasak. Kasit Piromya diganti oleh Surapong sebagai menteri Luar negeri. Duta Besar Asda Jayanama, mantan Wakil Tetap Thailand di New York yang menjadi Ketua Delegasi Thailand dalam *the Thai-Cambodian Joint Commission on Land Demarcation* juga telah diganti oleh Bundit Sottiplarit. Dubes Thailand untuk Belanda, Virachai Plasai telah diberhentikan sebagai penasihat *the Thai-Cambodian Joint Boundary Commission*. Sementara parlemen Thailand 60% di dominasi oleh partai Pheu Thai pimpinan PM Yingluck Shinawatra. Dan tentunya dukungan akan mengalir untuk PM Yingluck Shinawatra. Melalui dukungan dari berbagai aktor maka upaya penyelesaian sengketa dapat direalisasikan.

Faktor Psikologis juga sangat mempengaruhi karakter kepemimpinan Yingluck Shinawatra didalam merubah kebijakan luar negeri Thailand. PM Yingluck Shinawatra merupakan pemimpin yang demokrasi karena mampu mengontrol kekuatan militer yang selama ini terus mengintervensi sistem politik Thailand. PM Yingluck menjadi sosok pemimpin yang berjuang menentang rezim militer dan pemimpin yang diktator. Perang diperbatasan adalah skenario militer dan PM Abhisit Vejjajiva. Perdana Menteri Yingluck tidak menyukai intervensi militer karena berdasarkan pada pengalaman masa lalunya, pihak militer terus mencari kelemahan

dengan menuduh Yingluck melakukan pemalsuan transaksi. Yingluck mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarganya menjadi penganiayaan politik.

Sekarang perang diperbatasan selesai karena pihak militer tidak lagi ikut campur didalam sistem politik Thailand dan PM Abhisit telah diganti oleh PM Yingluck Shinawatra. Secara ikatan pribadi, Yingluck cenderung lebih dekat dengan Kamboja. Nilai dan bakat ekonom Yingluck membuat Beliau lebih memilih untuk memperluas kerjasama ekonomi dibandingkan bermusuhan dengan Kamboja. Penyelesaian sengketa perbatasan dengan menerima keterlibatan ASEAN serta diizinkan tim observer Indonesia untuk ditempatkan diwilayah sengketa sebuah indikasi bahwa PM Yingluck Shinawatra adalah pemimpin yang terbuka dan berjuang untuk demokrasi.

Maka dalam kesimpulan ini Ada beberapa point yang bisa diperoleh bahwa ;

- Pertama, Perubahan kebijakan luar negeri disebabkan oleh perubahan struktur pemerintah terutama pemimpin negara. Pergantian kepala pemerintahan cenderung akan merubah sistem politik negaranya. Sedangkan sistem politik berhubungan erat dengan kebijakan luar negeri. Pemimpin dengan ide baru akan berusaha merubah kebijakan luar negeri sesuai dengan tujuan negaranya. Peralihan kekuasaan perdana menteri oleh PM Yingluck telah menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri Thailand.

- Kedua, dukungan dari berbagai aktor dalam negeri juga ikut mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Sehubungan dengan pemerintahan baru, PM Yingluck telah mengganti aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan.
- Ketiga, terletak pada masalah politik domestik, kebijakan luar negeri sangat penting dalam perjuangan untuk mencapai kekuasaan. Dinamika politik dalam negeri dapat mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat melalui perebutan kekuasaan politik dalam negeri dimana isu-isu kebijakan luar negeri menjadi pusat perhatian. Pemimpin politik bersaing dengan menggunakan isu-isu kebijakan luar negeri. Para petinggi politik bertarung memperebutkan kekuasaan mereka dengan menggunakan isu kebijakan luar negeri dan jika berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat maka pemimpin yang baru akan berkuasa dan kebijakan luar negeripun akan berubah. Point ini jelas terlihat ketika konflik perbatasan wilayah disekitar kuil Preah Vihear dimanfaatkan untuk satu tujuan politik..
- Keempat, Pendekatan psikologis mempengaruhi karakter kepemimpinan Yingluck Shinawatra.

Maka dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa teori yang dikembangkan oleh Kjell Goldmann sangat relevan. Dan melalui penelitian ini penulis menyatakan mendukung teori tersebut. Sementara pendekatan Psikologis

mempengaruhi karakter kepemimpinan Yingluck Shinawatra. Yingluck adalah pemimpin politik yang demokrasi berjuang menentang rezim militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Goldstein, Joshua S and John C Pevehouse. *Intenational Relation Eight Edition*. USA. 2007

May rudi, Teuku. SH,MH,MIR, *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung. 2005

Mas'oud, Moechtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metologi*. Jakarta: LP3ES. 1990

Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2000

Nahmias, Wolinskky and Deltle F.S. *Introducion; Metodologi in International Relation Research*. 2003

M. Yani, Yayan dan A.A Banyu Perwita. *Pengantar Ilmu hubungan Internasional*. Pt. Remaja Rosda Karya. Bandung. 2005

Packdeekong, Monticha. *Who Owns the Preah Vihear temple A Thai Position*. *Jurnal of East Asia and international Law*. 2009

Smith, Steve, Amelia Hadfield, Tim Dumne. *Foreign Policy Theories: Actors & Cases* .Oxford: Oxford University. Inggris. 2008

Touch, Bora. *Vihear Temple of Cambodia Position*. *Jurnal of East Asia and International Law*. Jiyun Institution. Cambodia. 2009

William, Shakespeare. *The Merry Wives of Windsor. Level Analisis and Foreign Policy*. *International Relations Articles In the New York times hapter 3. USA*. 2009

JURNAL

Barlow, Lucas G. *The Preah Vihear Temple;What 's Claim*.(Thesis;Naval Postgraduate School,Monterey California. USA).2011

Chachavalpongpun, Pavin. *The Dispute Thai Cambodia Border*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapura. 2011

Chachavalpongpun, Pavin, *Yingluck Shinawatra Foreign Policy*. View Point; Commen On Analisis On Critical Global And Regional Trend, Issues And Developmnet. Institute of south eat asia studies. Singapura. 2012

Choi, Shanghan. *Democratic Leadership: The Lessons of Exemplary Models for Democratic Governance*. International Jurnal of Leadership Studies. Florida Atlantic University. USA. 2007

Dugis, Vinsensio. *Explaining Foreign Policy Change*. Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Air langga. Surabaya. 2006

Duncan, McCargo and Ukrist Pathmanond, *The Thaksinization of Thailand*, NIAS Press. 2005

Havas Oengroseno, Havis. *Sengketa Perbatasan Antar ASEAN*. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Kementrian luar negeri Republik Indonesia. Jakarta. 2010

Hinton, Khmerness and The Thai Other: *Violence, Discourse and Symbolism in the 2003 Anti-Thai Riots in Cambodia*. 2003

International Court Of Justice. *Request For Interpretation Of The Judgment of 15 june 1962 In The Case Concerning The Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*. Juli 2011

Kasetsiri, Charnvit , "Thailand-Cambodia: A Love-Hate Relationship," *Kyoto Review of Southeast Asia* 3, 2003.

Lentner, Howard. *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*. Ohio: USA. 1974

Masrul, Massad, *Perkembangan politik di Thailand; Sistem Pemilu, Partai Politik dan Kudeta*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional; Universitas Pasundan. Bandung. 2012,

Moen, Alexander dan inu Barbee. *The Foreign Policy Of Barack Obama Dreaming and Doibg*. Frannses institute of Canada. Canada. 2010

Pawakapan, Puangthong, "*From Cooperation to Disintegration; the Roles of State and Uncivil Society in Thailand at the Temple of Preah Vihear*", Walter Shorenstein Asia Pacific Research Center, Stanford University, May 2011, chapter 3

Pongsudhirak , Thitinan. *Thailand's Security Outlook: Next-Door, Indoor, Non-Traditional and Geo-Regional*.chapter 5. 2011

Packdeekong, Monticha. Who Owns The Preah Vihear Temple A Thai Position. Jurnal Of East Asia and International Law. 2007

Soesilowati, Sartika M.A, PhD. Dampak Kerusuhan Politik Thailand terhadap ASEAN. Center for Strategic and Global Studies Briefing /CSGS;Departemen hubungan internasional universitas Airlangga.Surabaya. 2010

Simon, Sheldom. *US-South Asia Relation Dismay At Thailand-Cabodia Skimilis, Arizona State University. USA.* 2011

Sri Issundari. *Latar Belakang Kudeta Militer Pada Masa Pm Thaksi Shinawatra.* Ilmu Hubungan Internasional. UPN Veteran. Yogyakarta. 2008

Torode, Greg. "Thailand to Clear Border Scourge," *South China Morning Post* (Hong Kong), October 30, 1998, (diakses pada via Newsbank Database: World News).

The Tempe of Preah Vihear. Proposed of inscription on The Worl Heritage List UNESCO. The Council Of Minister Kingdom Of Cambodia. Pnome Penh. 2008

Waging Peace; ASEAN And The Cambodia-Border. Crisis Group Asia Report N 215. 6 December 2011

Webber, Mark and Michael Smith. *Foreign Policy in a transformed world.* (United Kingdom: Prentice Hall, USA, 2002

Yousefi, Amir. *Iran's Foreign Policy During Ahmadinejad from Confrontasi to Accomodation.* Sid Bahesthi Univeity, Tehran. Iran. 2010

SKRIPSI

Hendri, Julius",*Strategi Thailand Dalam Menghadapi Masalah Perebutan Wilayah Dengan Kamboja(studi kasus wilayah disekitar kuil preah vihear),* (S.IP ;skripsi, Universitas Riau; Pekanbaru). 2011

Nurul Heida Muhadjin, Aulia. *Kebijakan Luar Negri Hugo Chaves terhadap AS.* Universitas Muhamadyah Yogyakarta. 2008

Amalia Aldiny, Alresty. *Kebijakan Nuklir Korea Utara Pada Masa Kim Jong Un.* Universitas Gajah Mada. Jokyakarta. 2012

MEDIA ELEKTRONIK

Okezone. PM Thailand;peninjau Indonesia tidak dapat ditempatkan diwilayah perbatasan. <http://okezone.com/article/PM-Thailand-peninjaw-Indonesia-tidak-dapat-ditempatkan-diperbatasan>.

Bbc news. PM Thailand dan PM Kamboja bertemu
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/05/110508_thailand_kamboja.shtm

Algooth putranto.*RI ditendang dari kamboja*,
http://en.bisnis.com/article/ri_ditendang_dari_kamboja

Antara news. *Konflik Thailand Kamboja Dapat Diselesaikan Dengan Baik*.
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/12/lree4e-indonesia-optimis-konflik-thailandkamboja-bisa-diselesaikan-dengan-baik>

Rakyat Merdeka. *rakyat Thailand Kamboja rebutan minyak toh*. 13 februari 2011
http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita_kemigasan/detil/256399/sstt..Thailand_kamboja_rebutan_minyak_toh.

Media Indonesia. *Keterlibatan pihak luar dalam penyelesaian sengketa ditolak*.
<http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-politik/39-internasional-news/11637-sengketa-thailand-kamboja-kembali-pecah-bagaimana-analis-melihatnya>

Media Indonesia. *Preah vihear sumber perseteruan kedua negara*.
Kompas. *Baku Tembak Pecah Diperbatasan*. 16 oktober 2008
http://www1.kompas.com/lipsus052009herculesread/2008/10/16/0759389/tentara_kamboja_vs_thailand.dua_tewas

<http://englishpeople.com/90777/7570450.html> diakses 10 Desember 2012
<http://international.okezone.com/read/2011/08/25/411/496176/pertemuan-thailand-kamboja-berakhir-kondusif>

Okezone. Kamboja mulai perlawanan dengan Thailand
<http://autos.okezone.com/read/2011/05/31/411/463018/kamboja-mulai-perlawanan-dengan-thailand-di-pbb>

Muchamad, Yanyan. *Politik Luar Negri* http://pustaka.unpad.ac.id/wcontent/uploads/2010/01/politik_luar_negeri.pdf

Oke zone.*Preah vihear, kekecewaan Thailand*.20 juli 2008
<http://okezone.com/read/2008/07/20/18/129236/preah-vihear-kekecewaan-thailand>
Preah Vihear

Kompas, *baku tembak pecah diperbatasan*, 16 oktober 2008

http://www1.kompas.com/lipsus052009herculesread/2008/10/16/0759389/tentara_kamboja_vs_thailand.dua_tewas

http://internasional.kompas.com/read/2011/08/06/0149_hunsen-beri-selamat-yingluckshinawatra http://www.bt.com.bn/news-national/2011/09/03_pm-yingluck-expected-visit-brunei

<http://www.thaigov.go.th/en/speech-a-press-release/item/73082-statement-by-her-excellency-ms-yingluck-shinawatra-prime-minister-of-the-kingdom-of-thailand-at-the-fifth-bali-democracy-forum-bali-indonesia-8-november-2012.ht>

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/09/110912_yngluck.shtml

<http://erabaru.net/nasional/50-politik/27767-indonesia-komitmen-selesaikan-konflik-thailand-kamboja>

http://www.indosiar.com/berita-terkini/tunggu-persetujuan-thailand---kamboja_90097.html

Intathep, Lamphai (6 July 2011). "Suu Kyi welcomes outcome". *Bangkok Post*. AFP Media Indonesia. *Keterlibatan Pihak Luar Dalam Menyelesaikan Sengketa Ditolak*.

http://www.pelitaOnline.com/read_cetak/270/Kamboja_tarik_ketujuh_dari_perbatasan_Thailand diakses pada 23 April 2012

http://dunia.vivanews.com./news/read/103233_gara_gara_thaksin_thailand_kamboja_menegang

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/17/lro56r-yingluck-upayakan-pemulihan-thaikamboja-thaksin-melenggang-di-phnom-penh>

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/08/20/lq8jz3-kelima-kali-kamboja-tarik-pasukan-dari-perbatasan-dengan-thailand> diakses pada 20 Desember 2012

<http://internasional.kompas.com/read/2012/04/10/16165683/Syarat.Utama.KonflikMereda>.

Renne RA kawilarang, Pemilu Thailand adik Thaksin menang telak, http://dunia.vivanews.com/news/read/230726_pemilu_Thailand_adik_Thaksin_menang_telak

Algooth putranto. *RI ditendang dari kamboja*, 14 februari 2011
http://en.bisnis.com/article/ri_ditendang_dari_kamboja.

<http://indopos.co.id/index.php/arsip-berita-internasional/39-internasionalnews/11637-sengketa-thailand-kamboja-kembali-pecah-bagaimana-analis-melihatnya.html>

http://en.wikipedia.org/wiki/Yingluck_Shinawatra

Gen Prawit: Army accepts election". *Bangkok Post*.

<http://www.globaltimes.cn/content/664588.shtml>

<http://www.suarapembaruan.com/home/yingluck-janjikan-rekonsiliasi-di-thailand/864>

Suara Karya. *Kuil Preah Vihear Sumber Sengketa Thailand Dan Kamboja*. diakses dari <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=211594>